



TERVERIFIKASI
DEWANPERS

PASANG IKLAN HUBUNGI
0811 5405 033

Lebih Dekat dengan Satu Klik

KUKAR DAN PPU BAKAL DIJADIKAN LUMBUNG PANGAN



BACA HALAMAN 2-3



**PEMROV KALTIM KOMITMEN
TINGKATKAN STANDAR
KETENAGAKERJAAN DI KALTIM**



**SOPIR TRUK
CONCRETE PUMP
DITETAPKAN
TERSANGKA
BACA HALAMAN 34**



Pj Gubernur Berencana Dirikan Lumbung Pangan Kaltim di Kukar dan PPU

SAMARINDA – Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Dr. Akmal Malik, memiliki rencana mendirikan lumbung pangan Kaltim di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Kedua wilayah ini dikenal sebagai sentra penghasil pertanian utama di Kalimantan Timur, terutama dalam

produksi beras yang merupakan kebutuhan pangan pokok masyarakat.

Akmal bahkan telah mengadakan pertemuan langsung dengan para petani di Desa Gunung Mulia, Kecamatan Babulu, Kabupaten PPU, guna berdiskusi mengenai permasalahan pertanian di daerah mereka.

“Di Kabupaten PPU, saya mendapa-

tkan informasi bahwa terdapat sekitar 9 ribu hektar lahan pertanian yang terbengkalai dan disebut sebagai lahan tidur. Bagi saya, tidak ada istilah lahan tidur, yang ada adalah orang yang tidur. Ketika orang tersebut bangun, maka lahan tersebut juga akan produktif,” tegas Akmal.

Setelah berdiskusi dengan camat, kepala desa, dan kelompok tani setempat, Akmal menyimpulkan beberapa permasalahan yang harus segera diselesaikan. Pertama, masalah irigasi sawah, keterbatasan infrastruktur dan peralatan pertanian (alsintan), biaya tinggi untuk pupuk, serta permasalahan pasca panen.

Ia pun meminta Dinas PUPR Kaltim untuk segera memperbaiki saluran irigasi utama yang ada agar lahan pertanian yang sudah ada dapat mendapatkan pasokan air, sehingga proses penanaman padi dapat dimulai bahkan selama musim ke-

marau. Akmal juga telah menjalin komunikasi dengan Komando Daerah Militer (Kodam) VI Mulawarman dan menyatakan bahwa pasukan TNI siap membantu persiapan PPU, terutama Babulu, sebagai sentra pangan di Kaltim.

"Kita tidak bisa mengharapkan semua permasalahan terselesaikan dalam satu kali upaya, tetapi kita akan mencoba secara bertahap," ujar Akmal saat Kunjungan Kerja ke Kecamatan Babulu PPU pada Rabu (25/10/2023) lalu, seperti dilaporkan melalui laman resmi Pemprov Kaltim.

Sebelumnya, Akmal Malik juga telah bertemu dengan Bupati Kukar, Edi Damansyah. Dalam pertemuan tersebut, Edi menjelaskan rencana besar Kukar untuk menjadi lumbung pangan bagi Kalimantan Timur.

"Semangat kami, cita-cita kami adalah menjadi lumbung pangan di Kalimantan Timur," kata Edi Damansyah di hadapan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik di Hotel Platinum Balik-



papan, pada Senin (23/10/2023) malam.

Kukar sendiri telah menyiapkan lima kawasan pertanian terintegrasi yang berbasis kawasan. Kawasan-kawasan tersebut terletak di Kecamatan Marangkayu dengan luas 1.476 ha, Sebulu-Muara Kaman dengan luas 3.034 ha, Tenggarong-Loakulu dengan luas 4.106 ha,

Tenggarong Seberang I dengan luas 4.447 ha, dan Tenggarong Seberang II dengan luas 4.447 ha.

Mimpi yang serupa ini akan diintegrasikan agar Kaltim dapat memiliki lumbung pangan yang mampu memenuhi kebutuhan pangan pokok di wilayah ini, terutama dalam rangka mendukung IKN di Kalimantan Timur. (KRV/pt/MK)



LET'S GO BEYOND



BOOKING THS SAJA

BTS

di Digiroom



Kode Promo
BTSOLI

DAPATKAN GRATIS 1st OLI TMO SYNTETIC SETIAP SERVICE BERKALA*





THS Sama Lengkapnya Dengan Bengkel

Mekanik Professional | Memenuhi SOP Kesehatan
Part Original | Tanpa Biaya Kunjungan | Bergaransi

Informasi - Call/WA :

Adi S : 0822-5435-0088

*Syarat dan ketentuan berlaku





AUTO 2000
member of ASTRA

Bontang

Urusan Toyota lebih mudah!



EDISI 28 OKTOBER 2023

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



PEMROV KALTIM KOMITMEN TINGKATKAN STANDAR KETENAGAKERJAAN DI KALTIM



Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim Dra Nina Dewi MAP saat membacakan sambutan PJ Gubernur Kaltim Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si

PEMROV KALTIM KOMITMEN TINGKATKAN STANDAR KETENAGAKERJAAN DI KALTIM

SAMARINDA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) berkomitmen akan terus meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia para pejabat fungsional Pengawas Ketenagakerjaan di Pemprov Kaltim.

Peningkatan kualitas pengawas tenaga kerja sangatlah penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kaltim. Oleh sebab itu Pemprov melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim, kembali menggelar pelatihan bagi jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan di lingkungan pemerintah provinsi Kaltim.

Hal ini dikatakan oleh Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik dalam sambutan yang dibacakan oleh Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi saat pembukaan Pelatihan Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan di lingkungan Pemprov Kaltim, pada Selasa (24/10/2023) di Aula Utama Kantor BPSDM Kaltim.

Atas nama Pemerintah Provinsi Kaltim Pj Gubernur Kaltim, mengapresiasi kegiatan ini demi meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia para pejabat fungsional Pengawas Ketenagakerjaan di Pemprov Kaltim.

"Dalam dunia kerja yang terus berkembang dengan cepat, fungsi pengawasan ketenagakerjaan merupakan peran yang sangat penting," ujarnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri-RB Nomor 30 Tahun 2020, Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Selain itu tugas pengawas ketenagakerjaan juga untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja dijaga dan keamanan serta kesehatan mereka di tempat kerja ter-

jamin. Dengan tugas yang sangat krusial ini, diperlukan peningkatan kompetensi dan keahlian yang terus menerus. Itulah sebabnya, pelatihan teknis bagi jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sangat penting," jelasnya.

Pj Gubernur berharap, dari pelatihan ini muncul pengawas-pengawas ketenagakerjaan yang profesional, kreatif dan inovatif dalam menjawab tantangan pembangunan kedepan.

"Seperti kita ketahui, tantangan kerja di masa depan dalam bidang apapun akan menjadi semakin berat. Terlebih dalam dunia ketenagakerjaan dengan kompleksitas permasalahan yang berkembang secara dinamis, pengawas ketenagakerjaan harus selalu siap menghadapi potensi perkembangan isu, seperti isu IKN dan isu pembangunan di Kaltim, serta masalah sehingga tercipta analisis masalah dan pemecahannya secara tepat," tutupnya. **(ADV/Han/BPSDM)**

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Prov Kalimantan Timur (Kaltim) Dra Nina Dewi MAP

PENTINGNYA TATA USAHA KEUANGAN DALAM PENGELOLAAN BLUD

SAMARINDA - Penatausahaan keuangan dalam Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah salah satu aspek yang sangat penting. Utamanya, dalam proses penilaian pengelolaan, pencatatan, pelaporan dan pengendalian keuangan yang melibatkan dana publik.

Hal ini dikatakan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Prov Kalimantan Timur (Kaltim), Nina Dewi saat membuka acara Pelatihan Bendaharawan Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) angkatan 1 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pada Senin (18/9/2023) lalu di Gedung Serbaguna BPSDM Jalan HM Rifadin Samarinda Seberang. "Penata usahaan keuangan

yang BLUD merupakan landasan yang sangat penting untuk menjaga integritas keuangan dan operational BLUD serta untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Ini juga membantu dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan dana publik," kata Nina Dewi.

Pelatihan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan program belajar bagi tenaga pengelolaan keuangan, khususnya yang menduduki jabatan bendahara.

Pengeluaran pada lembaga Blud agar memiliki pengetahuan keterampilan dan sikap yang baik dalam melaksanakan, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan pengeluaran APBD atau anggaran satuan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Di akhir tanggapannya, Nina

berharap peserta dapat memanfaatkan pelatihan ini sebaik-baiknya dan juga mengikuti pelatihan lain yang akan dilaksanakan BPSDM Provinsi Kaltim.

"Saya berharap para peserta tidak hanya sampai disini untuk mengembangkan diri, tapi terus proaktif mengikuti pelatihan BPSDM lainnya," tutupnya.

Diketahui dalam pelatihan ini, disampaikan materi-materi yang komprehensif dan relevan dengan tantangan yang dihadapi oleh bendaharawan BLUD saat ini, dengan menggali berbagai aspek yang berkaitan dengan manajemen keuangan publik peraturan terkait dan praktik terbaik yang dapat membantu peserta dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif. **(adv)**

Pewarta : Hanaf

Editor : Nicha Ratnasari



Sesi Foto bersama Kepala BPSDM Kaltim Dra Nina Dewi MAP, Staf Ahli Gubernur Bidang I Politik Hukum dan keamanan Ririn Sari Dewi SIP MSi beserta undangan dan peserta pelatihan.

BPSDM KALTIM GELAR PELATIHAN PELAYANAN NAKES HINGGA PENDAMPINGAN HUKUM BAGI ASN

SAMARINDA – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Timur (Kaltim) pada Selasa (19/9/2023) lalu, telah menggelar 2 pelatihan sekaligus. Yakni, Pelatihan Pelayanan Prima dan Komunikasi Efektif bagi Tenaga Kesehatan (Nakes). Selain itu, Pelatihan Hukum Acara dan Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta Layanan Pendampingan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Biro Hukum di Lingkungan Pemkab/Pemkot dan Provinsi Kaltim.

Pelatihan yang digelar Ruang Serbaguna Lantai 5 Hotel Fugo Big Mall Samarinda tersebut, rencananya akan digelar selama 5 hari, mulai 19 – 24 September 2023.

Kepala BPSDM Dra Nina Dewi sangat berharap dukungan seluruh perangkat daerah dalam menjamin kualitas SDM para ASN yang bekerja di instansi pemerintah.

“Kami berharap kerjasamanya agar semua kualitas ASN kita lebih berkualitas. Jadi petakan kebutuhan ASN kita agar tercapai kebutuhan waktu pelajaran ASN, karena tujuan peningkatan kualitas ASN tidak akan

tercapai jika tidak ada dukungan semua perangkat daerah,” tegasnya.

Staf Ahli Gubernur Bidang I Politik Hukum dan Keamanan Ririn Sari Dewi SIP MSi, memberikan sambutan sekaligus membuka acara pelatihan.

Hadir sekaligus membuka acara Staf Ahli Gubernur Bidang I Politik Hukum dan Keamanan, Ririn Sari Dewi yang sangat menyambut baik program pelatihan ini.

“Saya sangat mengapresiasi pelaksanaan kedua pelatihan ini. Ini merupakan komponen yang sangat baik dan bisa menciptakan tatanan hukum yang lebih baik pelayanan kesehatan yang lebih efisien di wilayah kita,” katanya.

Ririn juga berharap semua peserta bisa mengikuti acara ini dengan sungguh-sungguh agar mampu mengaplikasikannya keilmuannya yang telah didapat dari pelatihan.

“Ikutilah pelatihan ini dengan sungguh-sungguh agar nanti bisa diaplikasikan dengan baik, dan atas izin Allah, semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar, dan dengan ini acara pelatihan secara resmi saya buka,” tutupnya. **(adv)**



Sesi Foto Bersama Peserta dan Pejabat BPSDM Kaltim

BPSDM Tutup Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 16 Tahun 2023, Siap Jadi Pejabat Pengawas Profesional

SAMARINDA - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menyelesaikan tugas pengembangan sumber daya manusia bagi Aparat Negeri Sipil (ASN) dengan memberikan Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP). Pelatihan ini telah mencapai Angkatan 16 Pemerintah Provinsi Kaltim, Kelas Kota Balikpapan, dan Kabupaten Paser.

Acara penutupan dilaksanakan, Rabu (27/9/2023) di Gedung Aula BPSDM Kaltim, Jalan HM Rifadin Samarinda Seberang. Kegiatan pelatihan ini telah dimulai sejak tanggal 8 Juni hingga 27 September 2023, selama 104 hari kalender.

Rincian waktu pelatihan terdiri dari 86 hari Non Klasikal dan 18 hari Klasikal, yang dilaksanakan dengan metode yang menggabungkan pembelajaran online dengan tatap muka (blended learning).

Ketua Panitia Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional BPSDM Kaltim, Rina Kusharyanti, S.STP., M.M., dalam laporannya menyatakan bahwa peserta PKP kali ini berjumlah 40 orang, terdiri dari Pejabat Pengawas dari berbagai Perangkat Daerah di

lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dan Kabupaten Paser.

"Jumlah peserta kita adalah 40 orang, terdiri dari pejabat pengawas dari Balikpapan dan Paser," ungkapnya.

Pelatihan PKP memiliki empat agenda utama dalam kurikulumnya, yaitu agenda Kepemimpinan Pancasila dan Bela Negara, agenda Kepemimpinan Pelayanan, agenda Pengendalian Pekerjaan, dan agenda Aktualisasi Kepemimpinan.

Hasil rapat penetapan kelulusan menyatakan bahwa peserta PKP Angkatan 16 Kelas Pemerintah Kota Balikpapan dan Kabupaten Paser Tahun 2023 telah dinyatakan lulus 100%. "Hasil rapat menyatakan bahwa semua peserta lulus," pungkasnya.

Tidak lupa, Rina juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kesuksesan kegiatan PKP Angkatan 16 ini.

"Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang tak terhingga. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala membalas kebaikan saudara-saudara semua," tutupnya.

Dalam sambutan dan sekaligus menutup acara PKP, Kepala BPSDM Provinsi Kaltim, Dra. Nina Dewi, M.AP,

mengucapkan terima kasih kepada peserta pelatihan PKP BPSDM Kaltim yang telah menyelesaikan pelatihan dengan baik dan sungguh-sungguh serta berhasil dinyatakan lulus.

"Kami atas nama Pemerintah Provinsi Kaltim mengucapkan terima kasih kepada peserta yang telah menyelesaikan pelatihan ini dengan baik dan bersungguh-sungguh, menyelesaikan pendidikan, dan membentuk diri menjadi Pejabat Pengawas yang profesional," katanya.

Nina Dewi juga berharap dengan lulusnya para peserta dan pengetahuan baru yang mereka bawa dari pelatihan PKP ini, mereka dapat memberikan efek positif bagi perubahan dan dapat menjadi referensi yang dapat diimplementasikan untuk membantu kelancaran tugas mereka, terutama dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat.

"Jadilah aparatur berkinerja tinggi, yang turut berperan serta dalam kemajuan daerah dengan meningkatkan kinerja di tempat kerja, memberikan kemudahan kepada pemangku kepentingan, terutama kepada masyarakat," tutupnya. **(ADV/Han)**

Pewarta: Hanafi
Editor: Agus Susanto



Tampilan dari Kanal YouTube (dari kiri) Moderator Ir. H. Salman Lumoindong, MM dari Widyaswara BPSDM Provinsi Kaltim, Narasumber Hospita Gloria Situmorang, S.H.,M.AP, Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Regional Kalimantan, dan Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan BPSDM Kaltim Siti Djaitun S.Sos MSi

BPSDM Kaltim Gelar Sharing Session Terkait Pengelolaan dan Pengembangan Karir Jabatan Fungsional ASN

SAMARINDA - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Sharing Session ke-43 dengan tema "Pengelolaan dan Pengembangan Karir Jabatan Fungsional" untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Provinsi Kaltim dan Luar Kaltim pada hari Selasa (3/10/2023). Kegiatan yang disiarkan secara live di Channel YouTube BPSDM Kaltim ini dimulai pukul 10.00 Wita hingga 12.00 Wita.

Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi yang diwakilkan Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan BPSDM Kaltim Siti Djaitun ini, dalam catatannya mengatakan BPSDM Kaltim berkomitmen dan berupaya untuk terus mengembangkan kapasitas ilmu pengetahuan ASN.

"Kami tetap optimis untuk terus meningkatkan kapasitas pengetahuan ASN salah satunya dengan menggelar metode sharing session ini," ujarnya.

Dia berharap para peserta khususnya ASN fungsional bisa menyerap ilmu yang disajikan dalam sharing session ke-43 ini dengan

sebaik-baiknya, terutama ilmu dalam pengelolaan dan pengembangan karir jabatan fungsional.

"Kami berharap semua peserta terkhusus ASN dengan jabatan fungsional bisa mengambil ilmu pengetahuan ini dengan sebaik-baiknya," harapnya.

Kegiatan Sharing Session ini digelar secara daring menggunakan aplikasi Zoom untuk para peserta dan acara ini juga disiarkan secara langsung dari kanal YouTube BPSDM Kaltim untuk ditonton oleh masyarakat secara umum.

Pada Sharing Session kali ini menampilkan Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Regional Kalimantan Hospita Gloria Situmorang sebagai narasumber dan dimoderatori oleh Widyaswara BPSDM Kaltim Ir. H. Salman Lumoindong, MM.

Acara ini sejak di buka diikuti 301 peserta dan hingga berita ini diterbitkan sudah diputar 300 kali. (adv)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan (SKPK) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Timur (Kaltim), Siti Djaitun S.Sos MSi.

KARIR ASN JABATAN FUNGSIONAL DITENTUKAN ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT

SAMARINDA - Seorang pejabat fungsional harus memahami peraturan yang menjadi landasan karirnya, karena jabatan fungsional sangat berbeda dengan jabatan administrasi maupun jabatan pimpinan tinggi, terutama dari segi kenaikan pangkatnya.

Hal ini dikatakan Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan (SKPK) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Timur (Kaltim), Siti Djaitun S.Sos MSi, saat Sharing Session ke-43 dengan tema Pengelolaan dan Pengembangan Karir Jabatan Fungsional yang digelar oleh BPSDM pada Selasa (3/10/2023) melalui aplikasi Zoom.

Siti menyebutkan, Jabatan Fungsional Merupakan Jabatan Karir Aparatur Sipil Negara yang bertu-

gas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Ketentuan Umum tentang Jabatan Fungsional ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional.

Angka Kredit adalah nilai kuantitatif dari hasil kerja Pejabat Fungsional. Angka kredit ini diperoleh dari Predikat Kinerja yang dilaksanakan secara tahunan atau dilakukan secara periodik yang dapat dihitung secara proporsional. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional sebagai

salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.

"Seorang pejabat fungsional naik pangkat dengan menggunakan angka kredit, berbeda dengan jabatan administrasi yang kenaikan pangkatnya reguler (4 tahun sekali)," ujarnya.

Peraturan ini dibuat lebih teknis agar mudah dipahami dan diimplementasikan sehingga dapat memberikan landasan bagi instansi pemerintah dalam melakukan pembinaan Jabatan Fungsional.

"Dengan ditetapkannya peraturan ini, Jabatan Fungsional dapat bekerja secara terorganisir dan kolaboratif dalam mendukung tugas dan fungsi organisasi," tutupnya. **(ADV/Han/BPSDM)**

**Pewarta: Hanafi
Editor: Agus Susanto**



Kepala BPSDM Kaltim Dra Nina Dewi MAP

Ikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional, Kepala BPSDM Kaltim Masuk 10 Besar dengan Nilai Sangat Memuaskan

SAMARINDA - Pusat Pelatihan dan Pengembangan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Puslatbang KDOD) Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) Samarinda, menggelar Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat II Angkatan 12 tahun 2023 yang digelar, Kamis (5/10/2023) di ruang auditorium Kantor Puslatbang KDOD LAN RI Samarinda.

PKN ke-12 tahun 2023 ini diikuti oleh 60 peserta yang berasal dari lembaga pemerintahan pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota, diantaranya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pemerintahan provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Kubar, Kabupaten Kukar,

Kabupaten Kutim, Kabupaten Paser, Kabupaten Berau, Kabupaten Mahulu, Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Tana Tidung.

Tampil sebagai perwakilan Pemprov Kaltim, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pemprov Kaltim Dra Nina Dewi MAP, disebutkan sebagai salah satu peserta yang masuk dalam 10 besar dengan kualifikasi sangat memuaskan

Pelepasan peserta PKN dilakukan oleh Kepala LAN RI Samarinda, Adi Suryanto, yang turut dihadiri Kepala Puslatbang KDOD LAN RI Samarinda, Muhammad Aswad dan juga oleh Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik secara virtual.

Akmal Malik mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi

kepada para peserta PKN tingkat II angkatan 12 yang telah mengikuti pelatihan selama 4 bulan.

"Selamat kepada seluruh peserta, ini adalah capaian yang luar biasa dan saya sangat bangga melihat semangat dedikasi dan komitmen selama pelatihan ini" ujar Akmal Malik

Pj Gubernur Kaltim ini juga mengatakan PKN merupakan wadah yang sangat penting dalam mengembangkan potensi kepemimpinan para kader terbaik bangsa.

"Dan melalui pelatihan ini juga telah memberikan wawasan pengetahuan yang sangat berharga dalam mempersiapkan diri sebagai pemimpin yang tangguh dan berkualitas," pungkasnya.

(ADV)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



(dari kiri) Kepala BKPSDM Kota Bontang Sudi Priyanto, Sekretaris Daerah Kota Bontang, Hj. Aji Erlynawati, MT dan Kepala Bidang PKMF BPSDM Kaltim Rina Kusharyanti, S.STP, MM.

BPSDM KALTIM DAN BKPSDM KOTA BONTANG SUKSES GELAR ORIENTASI PPPK UNTUK 4 ANGKATAN

SAMARINDA – Demi menciptakan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bekerja sama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) gelar Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang, angkatan 68, 69, 70, dan 71.

Acara yang sebelumnya dibuka Gubernur Kaltim Isran Noor Jumat (29/9/2023) lalu, Kamis (5/20/2023) secara resmi ditutup Sekretaris Daerah Kota Bontang, Hj. Aji Erlynawati, MT, di Aula Utama Kantor BPSDM Kaltim Jalan HM Rifadin, Samarinda Seberang.

Turut hadir pada agenda penutupan, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (PKMF) BPSDM Kaltim, Rina Kusharyanti mewakili Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, Kepala BKPSDM

Kota Bontang Sudi Priyanto.

Kepala Bidang PKMF BPSDM Kaltim, Rina Kusharyanti, menyebutkan pelaksanaan Orientasi PPPK ini hasil kerja sama antara BPSDM Kaltim dan BKPSDM Kota Bontang.

"Hari ini, telah dilaksanakan penutupan Orientasi PPPK dari 4 angkatan, dari pemerintah kota Bontang, kegiatan ini hasil dari kerjasama kami dengan BKPSDM Kota Bontang," ujarnya.

Dengan ditutupnya acara ini Rina berharap semoga peserta Orientas PPPK Kota Bontang ini memahami peran tugas dan fungsi sebagai ASN PPPK.

"Semoga dapat lebih memahami peran dan fungsi ditempat kerja dapat lebih memahami SOPK dapat lebih memahami tugas PPPK yang merupakan ASN Pemkot Bontang," tutupnya. **(ADV)**

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Kepala BKPSDM Kota Bontang Sudi Priyanto, Sekretaris Daerah Kota Bontang, Hj. Aji Erlynawati, MT dan Kepala Bidang PKMF BPSDM Kaltim Rina Kusharyanti, S.STP, MM. Sesi Foto bersama peserta.

160 PPPK Ikuti Orientasi BPSDM Kaltim

SAMARINDA – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bekerja sama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bontang telah berhasil menggelar Orientasi 160 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang.

"Hari ini (kemarin, red) telah dilaksanakan penutupan Orientasi PPPK dari 4 angkatan, terdiri dari 160 PPPK dari pemerintah kota Bontang, kegiatan ini hasil dari kerjasama antara BPSDM Kaltim dan BKPSDM Kota Bontang," ujar Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (PKMF) BPSDM Kaltim, Rina Kusharyanti.

160 orang tersebut terbagi dari 4 angkatan yakni angkatan 68, 69, 70 dan 71. Setiap angkatan terdiri dari 40 orang PPPK, semua mengikuti orientasi pada 2 - 5 Oktober 2023 di Kantor BPSDM secara tatap muka atau

klasikal dan para peserta menginap selama 3 hari di Asrama yang ada di kompleks perkantoran BPSDM Kaltim, Jalan HM Rifadin Samarinda Seberang.

Rina berharap semua ilmu yang telah didapat pada orientasi PPPK kali ini mampu diterapkan secara baik oleh 160 PPPK angkatan 68, 69, 70 dan 71.

"Semoga para peserta bisa memahami tugas dan peran serta fungsi dari PPPK itu sendiri," pungkasnya.

Acara yang sebelumnya dibuka Gubernur Kaltim Isran Noor Jumat (29/9/2023) lalu di Hotel Mercure Samarinda, secara resmi ditutup Sekretaris Daerah Kota Bontang, Hj. Aji Erlynawati, MT, di Aula Utama Kantor BPSDM Kaltim Jalan HM Rifadin Samarinda Seberang pada Kamis (5/20/2023).

Dalam acara penutupan hadir pula Kepala BKPSDM Kota Bontang Sudi Priyanto. **(ADV)**

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Disbun Kaltim Bersama Dewan Pakar Bahas Ranpergub Soal Tata Cara Pengolahan Hasil Perkebunan

SAMARINDA - Dinas Perkebunan Kalimantan Timur (Disbun Kaltim) menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang "Tata Cara Pengolahan Hasil Perkebunan" bersama dengan beberapa Dewan Pakar Pertanian dan Perkebunan Kaltim.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas (Kadis) Perkebunan Ahmad Muzakkir menerangkan maksud dari pengolahan hasil perkebunan serta optimalisasi hasil yang bakal diperoleh para Pekebun di Kaltim.

"Pengolahan hasil perkebunan yaitu berbagai kegiatan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ada dalam memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan dan/atau kerusakan, dan memperoleh hasil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi," terang Muzakkir, Jumat (27/10).

Dirinya menambahkan, Ranpergub yang tengah dibicarakannya bersama para dewan pakar itu bakal menjadi petunjuk lengkap bagi para pelaku usaha perkebunan di Bumi Etam.

"Rancangan Peraturan Gubernur yang sedang kita susun dimaksudkan menjadi pedoman bagi pelaku usaha perkebunan dalam menerapkan prinsip-prinsip penanganan panen, pascapanen, dan tata cara pengolahan hasil perkebunan yang baik," terang Ahmad Muzakkir

la menambahkan tujuan dari rancangan peraturan tersebut agar setiap bentuk pengolahan perkebunan di Kaltim memiliki landasan hukum yang kuat sebagai pencegahan atas kemungkinan terjadinya pelanggaran.

Lebih jauh, Muzakkir mengemukakan rancangan tersebut memberi jaminan bahan baku dengan kualitas tinggi yang diproduksi di Benua Etam.

"Tujuan yang ingin kita capai ada-

lah memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan tata cara pengolahan hasil perkebunan. Demikian juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam tata cara pengolahan hasil perkebunan," tandas Muzakkir.

Tentunya kata Muzakkir, untuk memberikan jaminan ketersediaan bahan baku yang berkualitas untuk industri pengolahan hasil perkebunan dengan mengoptimalkan penggunaan bahan baku yang berasal dari Pekebun di Provinsi Kaltim

"Akan ada tata cara bagaimana mendorong Pekebun untuk menerapkan manajemen ekonomi rumah tangga yang efisien untuk kelangsungan usaha perkebunannya," tuturnya.

Diketahui, secara intens dewan pakar mendampingi dalam proses yang telah berjalan, dan menjadi bagian dalam penyusunan Ranpergub tersebut. (ADV/MK)



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN



<http://dinkes.kaltimprov.go.id>

Dra. Sri Wahyuni MPP
SEKDA PROV. KALTIM

Dr. Akmal Malik, M.Si
D. GUBERNUR KALTIM

dr. H. Jaya Muallimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
KEPALA DINAS KESEHATAN KALTIM



Rumah Sakit Mata Kaltim sudah berjalan bertahap.

RS Mata Kaltim Kantongi Izin Operasional, Dinkes Kaltim Kolaborasi RS Mata di Bandung

SAMARINDA- Gedung Rumah Sakit Mata Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di Jalan M Yamin Kota Samarinda, dibangun berkonstruksi 5 lantai. Rumah Sakit Mata tersebut telah diresmikan oleh Gubernur Kaltim Isran Noor pada Juni 2023, perlahan beroperasi dengan melengkapi berbagai sarana prasarana guna melayani masyarakat.

Rumah Sakit itu terdiri dari Unit Gawat Darurat (UGD), pelayanan rawat jalan, rawat inap dan ruang operasi serta perkantoran di lahan seluas 6.000 meter persegi.

Dinas Kesehatan Kaltim kini terus melakukan monitoring RS Mata dan memberikan berbagai dukungan. Surat izin operasional juga sudah terbit dari Pemerintah Kota Samarinda.

“Rumah Sakit Mata telah berjalan, sebagian besar sudah pindah bertahap, termasuk izin operasional yang baru juga sudah terbit dari Pemkot Samarinda,” kata Kepala Dinkes Kaltim, Jaya Muallimin, Jumat (27/10/2023).

Lebih lanjut, guna pemenuhan tenaga medis, Dinkes Kaltim melakukan kerjasama Rumah Sakit Mata di Bandung. Termasuk, tindakan medis yang belum bisa dilaksanakan di rumah sakit ini.

“Ada kegiatan yang belum bisa dilaksanakan maka kita meminta dukungan dari Rumah Sakit Mata Pusat di Bandung,” ujarnya.

Pembangunan Rumah Sakit Mata dilengkapi fasilitas modern juga merupakan sarana kesehatan khusus pe-

layan kesehatan mata untuk wilayah di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Kemudian, pihaknya terus memberikan dukungan operasional berbagai rumah sakit di bawah naungan Dinkes Kaltim. Terbaru, RSUD Salehuddin 2 yang diupayakan segera bisa beroperasi 100 persen.

“Kita terus mendukung dari bidang program, SDM, fasilitas alat kesehatan, serta anggaran. Untuk RSUD Salehuddin 2 itu, gedungnya belum bisa dipakai walau sudah diresmikan Pak Gubernur. Jadi, kita masih di gedung yang lama, jika sudah diserahkan artinya 100 persen berarti bisa operasional,” pungkasnya. **(ADV/nta)**

Pewarta : *Ernita*

Editor : *Nicha Ratnasari*

Dinkes Kaltim Beberkan Ciri-ciri Gejala Serangan Stroke

SAMARINDA- Stroke merupakan penyakit mematikan dengan kematian paling tinggi. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur (Kaltim) sebut masyarakat untuk mengenali gejala stroke lebih awal.

Provinsi Kaltim menduduki peringkat pertama dengan prevalensi stroke tertinggi di Indonesia. Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, angka prevalensi stroke Kaltim mencapai 14,7 persen atau diperkirakan sebanyak 2,1 juta jiwa. Dari total populasi di Indonesia yang mencapai 271,9 juta jiwa.

Karena itu, penting untuk mengenali gejala stroke sejak dini. Guna mengantisipasi penyakit stroke dan menekan angka prevalensi stroke di Indonesia, utamanya Kaltim.

Hal itu disampaikan melalui sem-

inar kesehatan yang digelar oleh Dinkes Kaltim tentang penyakit stroke, di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (26/10/2023) kemarin.

Terlepas itu, Perwakilan Himpunan Dokter Neurologi Kaltim Fajar Prabowo menuturkan, terdapat banyak mitos yang beredar mengenai penyakit stroke. Salah satu mitos yang paling dipercaya ialah stroke hanya menyerang para orang tua saja. Faktanya, stroke bisa menyerang siapa saja tanpa mengenal usia.

"Penyakit stroke dapat dicegah dengan menghindari perilaku hidup tidak sehat, yang berisiko menimbulkan penyakit stroke. Di antaranya, penggunaan tembakau dan mengonsumsi makanan atau minuman manis dan makanan berlemak," terangnya saat menjadi narasumber

dalam seminar Dinkes Kaltim.

Salah satu komplikasi jangka panjang yang paling sering muncul akibat stroke yakni lumpuh di beberapa area tubuh.

Sayangnya, sekitar 80 persen masyarakat Indonesia tidak mengetahui gejala stroke. Sehingga, seringkali penanganan stroke menjadi terlambat. Sehingga, perawatan cepat dapat membantu kesembuhan pasien lebih pesat.

"Keterlambatannya pasien ditangani dalam waktu kurang dari 10 menit saja, semakin banyak sel saraf pada otak yang mati atau rusak. Nah, ini faktor utama penyebab pasien itu tidak kunjung sembuh," pungkasnya. (ADV/nta)

Pewarta : *Ernita*

Editor : *Nicha Ratnasari*



Para pemenang turnamen saat menerima hadiah.

IST

Dinkes Adakan Turnamen Badminton Antar Rumah Sakit

BONTANG – Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-59, Dinas Kesehatan (Dinkes) Bontang mengadakan turnamen badminton antar rumah sakit se-Bontang. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari sejak Jumat (20/10/2023) lalu di Gedung Badminton Amarik.

Muhammad Mahfuds, Koordinator Turnamen Badminton HKN ke-59 menjelaskan, bahwa HKN diperingati setiap tanggal 12 November tiap tahunnya. Karenanya pihaknya

mengadakan turnamen ini untuk ikut merayakan HKN tersebut.

"Selain itu dengan turnamen ini kami ingin mempererat silaturahmi antara fasilitas kesehatan dan tenaga medis di Bontang," ujarnya.

Dibeberkannya, kegiatan ini diikuti sebanyak 5 rumah sakit ditambah perwakilan Dinkes Bontang. Turnamen ini mempertandingkan nomor beregu dan di dalam nomor beregu tersebut terdapat nomor ganda putra, ganda putri, dan campuran.

"Ya semacam Thomas dan Uber

Cup lah. Masing-masing rumah sakit mengirimkan 2 tim perwakilan. Sementara Dinkes mengirimkan 4 tim perwakilan," ungkapnya.

Dari hasil turnamen tersebut keluar sebagai juara 1 adalah RS Amalia A. Lalu juara 2 diraih RSUD Taman Husada A. Kemudian untuk juara 3 terdapat juara 3 bersama, yaitu RS PKT A dan RSIB A.

"Masih banyak agenda kegiatan kami ke depannya, dalam rangka memperingati HKN ke-59 ini," pungkask Mahfud. (al/adv)



RAFI'/MEDIA KALTIM

Padat karya normalisasi parit dan pembuatan kandang kambing di RT 17 dan RT 18 Kelurahan Maluhu.

Tekan Inflasi Daerah, Distransnaker Kukar Gelar Padat Karya Produktif di Kelurahan Maluhu

TENGGARONG - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kutai Kartanegara (Kukar), menggelar kegiatan padat karya di Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggarong, Kukar. Ini menjadi program dalam menekan angka inflasi di daerah. Seperti yang diamanatkan oleh pemerintah pusat, kepada seluruh daerah. Termasuk kepada Pemkab Kukar.

Sebanyak dua jenis padat karya yang digelar oleh Distransnaker Kukar di RT 17 dan RT 18 Kelurahan Maluhu. Yakni padat karya yang bersifat produktif dengan membangun kandang kambing dan pemberian 20 bibit ternak kambing. Juga padat karya infrastruktur, berupa normal-

isasi drainase atau parit di wilayah RT 17 dan RT 18.

Dijelaskan Kabid Pemberdayaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Distransnaker Kukar, Syarifah Rositah, tiap jenis padat karya ini akan dikerjakan masing-masing 1 kelompok yang berisi 22 orang anggota. Dikerjakan selama 10 hari, dengan sistem bahan infrastruktur dan alat pengerjaan yang disiapkan langsung oleh Distransnaker Kukar.

"Semua pekerjaan akan dibayar Rp 150 ribu per orang, bahan disiapkan Disnakertrans Kukar, kemudian bibit ternak kambing juga," ujar Rositah, Jumat (27/10/2023).

Dilanjutkan Rositah, dengan adan-

ya kegiatan ini tentunya akan mengurangi jumlah pengangguran. Padat karya produktif pembuatan kandang dan pemberian bibit ternak kambing misalnya, kelompok ternak yang menjadi sasaran ini akan melakukan pembudidayaan ternak kambing. Sehingga warga yang memang kebanyakan sebagai petani ini, bisa mengisi waktu musim tanam selanjutnya dengan mengurus ternak kambing.

"Kemudian kurangi angka kemiskinan, seperti normalisasi parit yang tadinya ibu-ibu tidak bekerja, jadi bekerja harian disini dan pembayaran via rekening masing-masing pekerja," tutup Rositah. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i

Sukses Kelola Bank Sampah, Kelurahan Maluhu Jadi Percontohan di Kukar

TENGGARONG - Pengelolaan bank sampah di Kelurahan Maluhu, dianggap sukses dijalankan. Bahkan tiga unit bank sampah di Kelurahan Maluhu, masing-masing di RT 3, RT 4 dan RT 23 menjadi percontohan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Mengingat Kelurahan Maluhu, menjadi wakil Kukar dalam penilaian Piala Adipura sebagai lokus kawasan pemukiman.

Melihat kesuksesan dalam pengelolaan ini, dukungan pun mengalir dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(DLHK) Kukar. Salah satunya pelatihan dan pendampingan manajemen dan digitalisasi bank sampah, pada Kamis (26/10/2023) kemarin.

"Alhamdulillah kita juga ditunjuk sebagai tuan rumah jadi percontohan bank sampah," ungkap Lurah Maluhu, Tri Joko Kuncoro, Jumat (27/10/2023).

Selanjutnya, kini Kelurahan Maluhu sedang berfokus untuk melakukan sosialisasi terkait hasil pelatihan yang mereka dapat. Kepada seluruh pengurus bank sampah di Kukar.

Kelurahan Maluhu pun, kini sedang menyusun apa saja yang diperlukan dalam pengembangan bank sampah kedepannya. Baik itu permohonan bantuan penunjang infrastruktur bank sampah ditempatnya. Seperti alat-alat mesin pencacah sampah, pelatihan dan pengelolaan bank sampah.

"Jadi ada peluang-peluang terkait proposal mereka (DLHK Kukar) siap fasilitasi Kelurahan Maluhu," tutupnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i



RAFI'I/MEDIA KALTIM

Lurah Maluhu, Tri Joko Kuncoro.

Upaya Penanganan Inflasi, Kelurahan Maluhu Dapat Jatah 2 Kegiatan Padat Karya

TENGGARONG - Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggarong, menjadi target kegiatan padat karya yang diselenggarakan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kutai Kartanegara (Kukar). Total sebanyak dua kegiatan padat karya yang digelar di dua Rukun Tetangga (RT), masing-masing di RT 17 dan RT 18.

Padat karya yang digelar bersifat produktif, yaitu pembangunan kandang dan penyerahan bibit ternak kambing sebanyak 20 ekor. Selain itu, juga padat karya berupa normalisasi parit atau drainase yang berada di dua RT tersebut.

"Itu berdasarkan hasil usulan kami terkait peluang-peluang yang ada di Distransnaker Kukar, Alhamdulillah

usulan kami terkait program padat karya untuk membuka lapangan kerja kami," ujar Lurah Maluhu, Tri Joko Kuncoro, Jumat (27/10/2023).

Tiap padat karya akan dikerjakan oleh satu kelompok yang berisikan 22 orang. Mereka akan bekerja selama 10 hari, dengan pengawasan langsung dari Bidang Pemberdayaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Distransnaker Kukar.

Selain membuka lapangan pekerjaan, para kelompok yang ditunjuk pun mendapatkan upah selama pengerjaan. Dengan anggaran Rp 150 ribu per hari. Sementara alat dan bahan seluruhnya disiapkan oleh Distransnaker Kukar. "Alhamdulillah membuka

lapangan pekerjaan yang kesehariannya sebagai petani, untuk menunggu musim tanam," lanjut Joko.

Joko pun yakin kegiatan padat karya ini akan berdampak dari segi ekonomi dalam jangka panjang. Terutama padat karya pembuatan kandang dan pemberian bibit ternak kambing. Karena ketika dikelola dengan baik, maka akan jadi sumber penghasilan baru bagi masyarakat.

"Warga tinggal merawat dan mencari pakannya saja. Sementara padat karya parit, hasilnya memperlancar air yang menggenang," tutup Joko. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i



RAFI'/MEDIA KALTIM

Kantor Lurah Maluhu

Kelurahan Maluhu Wakili Kukar dalam Agenda Proklamasi

TENGGARONG - Beberapa prestasi dibidang lingkungan direngkuh Kelurahan Maluhu. Setelah ditunjuk sebagai pilot project pengelolaan bank sampah, kini ditunjuk mewakili Kutai Kartanegara (Kukar) ditingkat nasional dalam Program Kampung Iklim (Proklamasi) garapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dijelaskan Lurah Maluhu, Tri Joko Kuncoro, Proklamasi sendiri mencakup berbagai aspek dan bidang lingkungan. Yakni berhubungan dengan penanganan sampah, pengurangan

emisi karbon dan hal terkait lainnya.

Proklamasi sendiri akan digelar selama 2 hari, yakni tanggal 3-4 November 2023. Kini, Kelurahan Maluhu bersama 11 kelurahan dan desa lainnya sedang mendapatkan pendampingan langsung dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kukar.

"Kalau di Kukar ada 12 desa dan kelurahan lainnya yang ditunjuk, yang memenangkan desa dan kelurahan ramah lingkungan," ujar Tri Joko.

Seluruh stakeholder pun akan dia-

jak berkolaborasi dalam Proklamasi ini. Mulai dari urusan ketahanan pangan, urusan persampahan, peran aktif kelompok taninya, peran aktif pemuda di kelurahan dan desanya. Selain itu juga terkait pemanfaatan tenaga surya, pemanfaatan air hujan, memanfaatkan lokasi pekarangan rumah. "Jadi betul seluruh lini dalam Proklamasi akan dinilai kementerian," tutupnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'

radar.
MEDIA
MEDIA KALTIM GROUP

INFO & PEMASANGAN IKLAN
CP. 0853 4894 3982

www.radaribukota.com | www.radarkutim.com
www.radarkukar.com | www.samarinda.com
www.radarberau.com | www.radar.paser.com | www.radarbaikpapan.com



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Pj Bupati PPU Makmur Marbun didampingi Kapolres PPU AKBP Hendrik Eka Bahalwan dan Dandim 0913/PPU Letkol Inf Arfan Affandi saat Apel Gelar Pasukan, Jumat (27/10/2023).

Makmur Pimpin Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pilkades Serentak PPU 2023

PPU - Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun memimpin Apel Gelar Pasukan, Jumat (27/10/2023). Dalam rangka memastikan kesiapan Pengamanan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang akan digelar pada 29 Oktober 2023 di PPU.

Apel dilaksanakan di Lapangan Polisi PPU yang turut dihadiri oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah pejabat terkait lainnya. Apel diikuti unsur TNI/Polri, Satpol PP dan pihak terkait lainnya di lingkungan Pemkab PPU.

Dalam apel itu, Makmur menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan selama proses Pilkades berlangsung. Karena

menurutnya semua memiliki tanggungjawab besar untuk memastikan bahwa Pilkades serentak tahun 2023 di Kabupaten PPU berjalan lancar, aman, dan adil.

"Kita harus menjaga ketertiban, keamanan, dan mencegah segala bentuk pelanggaran yang dapat mengganggu proses demokrasi ini," ujarnya.

Makmur juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengamanan Pilkades tersebut. Termasuk aparat kepolisian, TNI, dan instansi terkait lainnya.

Ia meyakinkan masyarakat PPU bahwa pemerintah daerah siap memastikan pelaksanaan Pilkades berjalan sesuai aturan dan prosedur

yang berlaku. Selain itu, Apel Gelar Pasukan ini juga menjadi momen untuk memeriksa kesiapan personel, peralatan, dan logistik yang akan digunakan selama pelaksanaan Pilkades.

"Semua elemen keamanan diharapkan dapat bekerja secara sinergis untuk menciptakan lingkungan yang kondusif selama proses Pilkades," sebut Makmur.

Lebih lanjut, dengan semangat persatuan dan kerja sama yang tinggi, Pemkab PPU berharap Pilkades Serentak tahun 2023 akan menjadi contoh demokrasi yang kuat dan terpercaya bagi daerah lain. "Kita harus siap bekerja keras untuk mencapai tujuan tersebut," tutupnya. (ADV/SBK)



Jumlah Penduduk Kota Samarinda Menurun hingga 3.000 Orang saat Pandemi Covid-19

SAMARINDA - Pandemi COVID-19 memang telah usai, namun masih banyak hal-hal yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat tentang dampak-dampak yang terjadi, termasuk data kependudukan di kota Samarinda yang tercatat turun drastis. Hal ini dikatakan Arsiparis Ahli Madya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Kalimantan Timur Risnawati SE MM

“Salah satu yang menjadi hot issue saat penyelamatan Arsip Covid-19 adalah jumlah penduduk Samarinda yang turun drastis,” ungkapnya,

Jumat (27/10/2023).

Hal ini terungkap saat pihaknya melakukan penyelamatan arsip COVID-19. Oleh sebab itu hal ini bisa dijadikan bahan penelitian oleh lembaga penelitian, apakah penurunan angka penduduk ini karena adanya pandemi atau karena perpindahan penduduk.

“Nah makanya ini jadi hot issue. Apakah karena pandemi atau perpindahan penduduk,” ujarnya.

Berdasarkan data yang dirilis Direktorat Jendral (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),

jumlah penduduk di Kota Samarinda ada sebanyak 825,490 ribu jiwa pada Juni 2021. Sedangkan di tahun 2020 hasil sensus penduduk Samarinda adalah sebanyak 827.994 jiwa.

Ada penurunan hampir di angka 3.000 jiwa, penduduk Samarinda berkurang dari tahun 2020 ke tahun 2021. Hal ini masih memerlukan kajian apakah karena dampak pandemi COVID-19, perpindahan penduduk atau salah perhitungan. **(ADV/Han/DPKD)**

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari

Depo Arsip Didominasi Arsip Lembaga yang Berubah Nomenklatur

SAMARINDA-Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (BPKD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) saat ini menyimpan arsip dari 50 lembaga. Akan tetapi, yang terbanyak adalah berasal dari lembaga yang sudah tidak ada lagi akibat perampingan lembaga ataupun pergantian nama (perubahan nomenklatur) yang dilakukan pemerintah Indonesia sejak era Presiden ke KH Abdurahman Wahid akibat Kebijakan Otonomi Daerah. “Jadi kita juga menyimpan arsip dari lembaga yang sudah tidak ada lagi,” ungkap Arsiparis Ahli Muda, DPKD Kaltim, Risnawati SE MM

Semua arsip tersimpan rapi di depo penyimpanan arsip milik DPKD kaltim yang berada di Jalan Bung Tomo No.130, Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda.

“Jadi lembaga- lembaga yang sudah tidak ada itu di antaranya, seperti Kanwil Penerangan sekarang jadi Diskominfo, Kanwil Pendidikan, sekarangkan berubah jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk seperti dulu ada Badan Kearsipan sekarang digabung sama Dinas Perpustakaan, sekarang jadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, dan lembaga lainnya yang juga digabung dan dipisah, termasuk juga 13 lembaga era Gusdur itu,” bebernya.

Penyimpanan arsip ini dilakukan sebagai bukti informasi dan sejarah, untuk bisa dijadikan pelajaran dan ilmu pengetahuan buat generasi saat ini dan generasi

mendatang. “Jadi ada 50 lembaga yang tercatat dalam daftar pencipta arsip yang telah menyerahkan ke DPKD Kaltim, dari 50 itu kebanyakan dari lembaga yang sudah tidak ada lagi termasuk 13 lembaga era Gusdur tadi” tutupnya. **(ADV/Han/DPKD)**

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari





Anggota Komisi II DPRD Berau, Darlena saat menggelar reses.

Banyak Aspirasi yang Serius dalam Reses Darlena

TANJUNGREDEB-Beberapa waktu lalu, Anggota Komisi II DPRD Berau, Darlena menggelar reses di Biatan. Ditemui beberapa persoalan serius yang harus segera ditangani.

Dia mengungkapkan, banyak aspirasi serius yang disampaikan, namun belum ada tindakan dari pemerintah untuk mengatasinya.

Ia menyebut, usulan yang berhasil tertampung diantaranya permasalahan tapal batas Kabupaten Berau dan Kutai Timur, bangunan Sekolah Dasar (SD) yang tidak layak serta masalah tenaga kesehatan.

"Petama, masalah tapal batas, ini sudah berjalan sejak lama dan berdasarkan informasi dari warga sekitar, sejak beberapa tahun belakang bukan karena batas saja, melainkan tindak diskriminasi oleh Ormas yang datang," terangnya.

"Parahnya lagi, mereka dengan

mudah mengambil dengan sistem rampas hasil kebun salah satu masyarakat yang berada di dua kampung Kecamatan Biatan," lanjutnya.

Ia memaparkan, dari keterangan warga kejadian tersebut, berlangsung sejak delapan tahun lamanya, hingga saat ini belum terselesaikan.

"Nanti saya akan mempertanyakan secara langsung kepada pihak eksekutif bagaimana penyelesaiannya. Ini masalah serius harus secepat mungkin di selesaikan oleh pemerintah daerah. Apalagi ini menyangkut kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Selain itu, terkait persoalan pendidikan, masih terdapat bangunan sekolah yang tidak layak dan perlu perhatian lebih. Darlena pun menyayangkan dari besaran anggaran yang diperuntukan, khusus penunjang pendidikan, tapi belum direalisasikan secara penuh.

"APBD kita besar, apalagi untuk pendidikan itu 20 persennya, lantas kenapa masih ada sekolah belum mendapat fasilitas yang baik," ucapnya.

Kemudian, usulan terkait tenaga kesehatan, hal ini dikarenakan tidak adanya fasilitas kesehatan di kedua kampung. Untuk itu, masyarakat meminta diberikan fasilitas guna mempermudah penanganan medis kedepannya.

Darlena menegaskan, seluruh usulan masyarakat akan diupaya sesegera mungkin. Mengingat, permintaan masyarakat dirasa cukup krusial.

"Akan saya pertanyakan nantinya aksi dari pemerintah setelah rapat pembahasan hasil usulan reses di masa sidang ketiga ini, bila perlu akan saya ajak langsung terjun ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat disini," tandasnya. (adv/dez)

Berdampak Baik ke Sektor Pariwisata, Pertahankan Jadwal Terbang Batik Air

TANJUNG REDEB – Kembalinya jadwal penerbangan maskapai Batik Air dengan rute Berau-Jakarta dan Berau-Surabaya menjadi setiap hari mendapat apresiasi Ketua Komisi II DPRD Berau, Andi Amir Hamsyah.

Dia mengungkapkan, kembalinya pelayanan Batik Air menjadi setiap hari sangat mempermudah masyarakat yang hendak bepergian ke luar daerah.

“Saya harap ini bisa terus bertahan setiap hari, karena mempermudah kita yang akan bepergian ke Jakarta dan Surabaya tanpa harus transit Balikpapan,” ungkapnya.

Andi Amir menilai, penerbangan langsung dari Surabaya dan Jakarta ke Berau juga sangat mempermudah wisatawan yang ingin berkunjung ke Bumi Batiwakkal.

“Tentunya hal ini juga semakin menarik minat wisatawan datang ke daerah kita. Selain harga yang

cukup hemat, juga mengifisienkan waktu,” tuturnya.

Dia mengaku sangat mengapresiasi upaya pihak terkait untuk mengembalikan jadwal operasional Batik Air ke Berau. “Saya harap jangan berubah lagi jadwal penerbangannya, upayakan terus terbang setiap hari,” tegasnya.

Dirinya menyebut, harga rute penerbangan Berau-Balikpapan menggunakan Batik Air juga mengalami penurunan harga, sehingga sedikit meringankan beban masyarakat.

“Ini merupakan keuntungan adanya pesawat berbadan besar yang beroperasi di Bandara Kalimantan, karena dapat menciptakan persaingan harga tiket,” terangnya.

Politikus Golkar ini berharap maskapai Batik Air terus melayani masyarakat kabupaten paling utara Kaltim ini. “Karena masuknya Batik Air ini dapat membuat harga tiket pesawat stabil,” pungkasnya. (adv/dez)



Ketua Komisi II DPRD Berau, Andi Amir Hamsyah

Jelang Pemilu, Anggota DPRD Harus Tetap Jalankan Tugas dan Fungsi Sebagaimana Mestinya



Ketua DPRD Berau, Madri Pani

TANJUNG REDEB - Menjelang pesta demokrasi tahun 2024, Ketua DPRD Berau, Madri Pani mendorong anggota dewan tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya.

Dia menyebut, ada 30 anggota DPRD Berau yang masing-masing memiliki agenda dan kesibukan. Akan tetapi, dinilainya kondisi tersebut bukan menjadi suatu alasan untuk tidak bertanggungjawab sebagai wakil rakyat. “Tugas dan fungsi DPRD tersebut di antaranya, fungsi legislasi atau pembentukan peraturan daerah, pengawasan, dan anggaran atau budgeting,” ungkapnya.

Menurut Madri, menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, tidak akan mengganggu kerja seluruh anggota DPRD Berau. Tetapi banyak penyesuaian di berbagai kegiatan atau pembahasan. “Tetapi memang akan menjadi lebih sibuk dari sebelumnya. Jadi bukan masalah,” tuturnya.

Madri menyebutkan, tupoksi anggota DPRD sudah jelas. jadi, terkait dengan tahun politik, tentu tidak berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat. jika ada keluhan, dan meminta hearing, tentu akan dilakukan. Begitu juga untuk pembahasan anggaran 2024. Hal ini tidak menjadi penghalang, meskipun musim pemilu.

Diakukannya, anggota DPRD dipilih oleh masyarakat, tentu keinginan masyarakat yang harus diutamakan. Bukan kepentingan pribadi. Terkait dengan masa politik, menurut Madri, bisa dikerjakan, disela-sela kesibukan melayani masyarakat. “Kenapa tidak bisa, bisa kok. Sama halnya dengan kegiatan reses juga masuk dalam pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (adv/dez)

TPI Tanjung Batu Dinilai Bisa Menjadi Sumber PAD

TANJUNG REDEB – Kampung Tanjung Batu akan memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI), maka dari itu Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga mendorong Dinas Perikanan (Diskan) untuk mengontrol produksi ikan di sana.

Dia mengungkapkan, pembangunan TPI tersebut merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang bermanfaat untuk kebutuhan masyarakat di Kecamatan Pulau Derawan. “Sehingga dengan adanya TPI tersebut, pendaratan ikan sudah terfokus di satu tempat saja,” ungkapnya.

Dibeberkannya, produktivitas ikan di Tanjung Batu tidak terkontrol dengan baik. Pasalnya, para nelayan langsung menjual hasil tangkapannya ke pengepul. “Tentu jika terus dibiarkan, dari

segi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak menguntungkan,” tuturnya.

Saga menerangkan, selama ini para pengepul memiliki pos-pos tersendiri. Hal itu, menurutnya membuat Diskan Berau sulit dalam mengontrol produksi ikan. “Karena para nelayan tidak lapor hasil produksinya, melainkan langsung menjualnya ke pengepul,” jelasnya.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menegaskan, Diskan Berau harus membuat inovasi untuk mengontrol hasil produksi nelayan di perairan Pulau Derawan dan sekitarnya.

“Karena TPI ini berkontribusi meningkatkan PAD, selain itu juga nelayan terbantu karena hasil tangkap mereka langsung dipasarkan secara luas,” pungkasnya. (adv/dez)



Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga

Direkomendasikan KPK, Dorong Penyelesaian Dermaga Teluk Sulaiman

TANJUNG REDEB - Anggaran sekisar Rp 25 miliar dibutuhkan untuk melanjutkan pembangunan penyelesaian Dermaga Teluk Sulaiman, Kecamatan Bidukbiduk. Diketahui, pengerjaan yang dilanjutkan berupa akses pendekat dari darat ke pelabuhan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Abdul Waris mengaku akan terus mengawal pembangunan dermaga tersebut hingga tuntas. “Untuk jetty, itu sudah terbangun. Jadi tinggal membangun trestel dan tempat bersandar kapal,” ungkapnya.

Dirinya membeberkan, kelanjutan pembangunan Dermaga Teluk Sulaiman merupakan rekomendasi KPK. Sebab, ditengah APBD Berau yang tergolong besar, jangan sampai ada pembangunan yang mangkrak. “Kita akan selesaikan dermaga itu. Karena menjadi rekomendasi KPK untuk diselesaikan. Jangan sampai mangkrak lagi lah,” ucapnya.

Sejak awal dibangun, Dermaga Teluk Sulaiman memang menggunakan Bankeu Provinsi Kaltim. Tahun ini Pemkab Berau juga diungkapkan Waris masih berusaha mengusulkan anggaran dari provinsi. Sayangnya belum dapat kucuran dana untuk



Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Abdul Waris

menyelesaikan dermaga itu.

Makanya, kata dia, lanjutan pembangunan Dermaga Teluk Sulaiman rencananya bakal dianggarkan pada APBD Murni 2024 mendatang. Apalagi APBD diprediksi akan naik. “Penyelesaian Dermaga Teluk Sulaiman, insyaallah akan dianggarkan pada APBD tahun depan. Karena sudah ada rekomendasi dari KPK juga untuk segera diselesaikan,” ungkapnya.

Dirinya juga mewanti-wanti agar jangan sampai membuat rencana infrastruktur baru terus tapi bangunan yang lama tidak selesai. Bahkan sampai bertahun-tahun tidak dirampungkan.

“Itu yang menjadi atensi kenapa tidak diselesaikan dulu bangunan lama, kemudian membuat lagi yang baru,” tandasnya. (adv/dez)



Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah

Jangan Samaratakan Pembangunan Pengamanan Pantai

TANJUNG REDEB - Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah menyoroti abrasi yang mengancam beberapa daerah di pesisir selatan Bumi Batiwakkal.

Ia mengharapkan pemerintah tidak menyamaratakan seluruh pembangunan pengamanan pantai. Pasalnya, diperlukan kajian serius agar penanganan tidak dilaksanakan sia-sia.

Dirinya menerangkan, pembangunan pengamanan pantai tersebut merupakan kewenangan pusat dan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan V di Tarakan. Namun hal itu bukan berarti pemerintah daerah tinggal diam.

"Penanganan abrasi itu jangan disamaratakan. Khususnya yang ada gelombangnya tinggi harus dibangun pengamanan pantai yang berbeda dengan yang gelombang lautnya kecil," jelasnya.

Yang mana tujuannya agar pengamanan pantai yang akan dipasang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Apalagi, sudah ada preseden buruk terkait hal itu, seperti pembangunan bronjong yang ada di Pulau Derawan.

"Perlu kajian matangnya supaya jangan baru dibangun terus rusak, dibangun rusak lagi. Ujung-ujungnya tidak ada manfaatnya," tegasnya.

"Ke depan masalah abrasi ini harus diperhatikan. Harus ada upaya-upaya. Terus harus dengan BWS. Sehingga bisa turun anggaran untuk pembangunannya," tandasnya. (adv/dez)



Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo

Dukung Target Pusat Turunkan Angka Stunting

TANJUNG REDEB - Adanya target pemerintah pusat untuk menurunkan persentase angka stunting didukung jajaran legislatif.

Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo mengungkapkan, stunting harus menjadi perhatian lebih untuk pemerintah, karena berpengaruh besar terhadap tumbuh kembang anak.

"Maka dari itu, penyuluhan dari posyandu harus digencarkan. Apalagi yang ada di kampung-kampung, tentu jadi prospek besar untuk menyuguhkan pola hidup sehat ibu dan anak," ungkapnya.

Menurutnya, jika penyuluhan dilakukan maksimal, maka pemenuhan gizi bagi bayi dapat terpenuhi. Hal itu juga menjadi tanggungjawab orang tua.

"Paling tidak, para orang tua yang memiliki anak bayi bisa mendapat pengalaman, pemahaman dan bimbingan dari para kader posyandu setempat," ujarnya.

Politikus Demokrat ini menegaskan, perkembangan seorang anak jangan sampai tidak diperhatikan. Sehingga persiapan menu makanan harus dipenuhi. Terlebih sudah ada lokasi khusus rawan stunting, yang dinilai perlu adanya intensitas pendampingan serta pembinaan harus ditingkatkan.

"Apabila hal-hal seperti itu diperhatikan dengan baik, kami yakin satu atau dua tahun ke depan angka stunting di Kabupaten Berau bisa menurun," pungkasnya. (adv/dez)



Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ichsan Rapi

Kegiatan Fisik Harus Perhatikan Aspek Kualitas

TANJUNG REDEB - Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ichsan Rapi menganggap banyak kegiatan pembangunan yang hanya berorientasi pada target penyelesaian, bukan hasil. Dia membeberkan, banyak kegiatan yang dilakukan selama ini hanya berorientasi pada selesainya pekerjaan tersebut, namun tidak pada hasil.

"Seperti pariwisata, sampai saat ini pariwisata banyak dijadikan alasan suatu pekerjaan yaitu untuk mendukung sektor pariwisata. Tetapi data menunjukkan bahwa sektor ini jalan ditempat karena sangat kecil dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian Berau secara umum yang dapat dilihat dari PDRB," jelasnya.

Kemudian jalan usaha tani, banyak jalan dibuat dengan nama Jalan Usaha Tani tetapi hasil pertanian dan perkebunan masyarakat tidak meningkat. Ada juga irigasi, dimana banyak jaringan irigasi dibuat tetapi hasilnya tidak ada.

"Konstruksi dalam pelaksanaan (KDP) yang mangkrak seperti jalan Bandara Mantaritip Segmenandara - S. Kelay dan S. Kelay - Mantaritip akibat tidak adanya jembatan. Inti dari semua itu adalah salahnya penempatan modal atau aset pemerintah, akibat tidak adanya perencanaan secara komperensif dan holistik," tambahnya.

Hal ini akan semakin tidak jelas jika bukan hanya bicara sampai outcome yang merupakan dampak jangka pendek tetapi pada impact yang merupakan dampak jangka panjang. (adv/dez)



Anggota Komisi II DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto saat menggelar reses.

Normalisasi Drainase jadi Perhatian Dedy Okto

TANJUNGREDEB - Anggota Komisi II DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto mendorong normalisasi drainase di wilayah perkotaan Bumi Batiwakkal. Dia mengungkapkan, ada beberapa usulan yang disampaikan oleh masyarakat Daerah Pemilihan (Dapil) I Tanjung Redeb. Hanya saja, salah satu usulan yakni normalisasi drainase dirasa cukup penting.

"Saluran irigasi drainase di daerah ini bisa dikatakan kurang baik. Apalagi, setiap turun hujan dengan curah tinggi,

pastinya akan banjir," ungkapnya.

Dirinya mengaku akan mengkoordinasikan hal tersebut dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau terlebih dahulu. Lalu, mengevaluasi terkait mekanisme penganggaran untuk perbaikan drainase tersebut.

"Tentunya dengan bentuk drainase yang agak besar dari sebelumnya. Agar saluran airnya sendiri bisa lebih lancar, jadi meskipun curah hujan tinggi sekalipun air tidak akan men-

gendap dan banjir juga tidak akan terjadi disini lagi," jelasnya.

Namun, penanganan terkait normalisasi drainase saluran air tersebut harus tetap melalui proses yang ada. Mulai dari penganggaran, Peninjauan yang dilakukan dinas terkait hingga pembangunannya nanti.

"Saya akan mengupayakan semaksimal mungkin agar tahap perealisasinya bisa segera terlaksana dan permasalahan banjir di daerah ini bisa teratasi," tutupnya. (adv/dez)



Anggota Komisi II DPRD Berau, Nurung

Mudahkan Kelompok Tani, Sarankan Pangkalan Pupuk

TANJUNG REDEB - Agar Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) mudah dalam memenuhi kebutuhan pupuk, Anggota Komisi II DPRD Berau, Nurung menyarankan setiap kecamatan memiliki pangkalan pupuk.

Dia menerangkan, pupuk sangat penting untuk petani. Sebab berpengaruh terhadap pemberian nutrisi ke berbagai unsur. "Pupuk ini memang sangat diperlukan baik itu pupuk subsidi atau non subsidi," ungkapnya.

Nurung membeberkan bahwa dirinya sudah menyampaikan keluhan petani mengenai pupuk ke Dirjen Pupuk dan Pestisida. "Padahal dulu tidak seperti itu. Petani mudah saja untuk mendapatkan pupuk," jelasnya.

Politikus Nasional Demokrat (NasDem) ini menyarankan kepada setiap kampung dan kecamatan memiliki pangkalan pupuk masing-masing. Agar Gapoktan langsung mengusulkan ke pangkalan pupuk di daerahnya, tanpa jauh-jauh mencari pangkalan pupuk.

"Saya sarankan setiap kampung, minimal di kecamatan punya pangkalan pupuk masing-masing," tandasnya. (adv/dez)



PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
BESERTA SELURUH JAJARAN SEKRETARIAT DPRD BERAU

Mengucapkan

Selamat & Sukses

ATAS PELANTIKAN

MUHAMMAD SAID, SH, MH

SEBAGAI SEKDA KABUPATEN BERAU



Hi.Syarifatul Sya'diah, S.Pd,M.Si
Wakil Ketua DPRD Kab. Berau

Madri Pani, SE
Ketua DPRD Kab. Berau

H.Ahmad Rifal, ST,MM
Wakil Ketua DPRD Kab. Berau

H. Abdurrahman U, SE, M.Si
Sekretaris DPRD Kab. Berau



— Come join us for New Avanza and New Veloz @auto2000_bontang —



LET'S TEST DRIVE!



DAPATKAN UNDIAN TEST DRIVE



AUTO2000 BONTANG

Jl. Wigen Kencana No. 226A, Sebelah Dar. Bontang Barat
Kota Bontang Kalimantan Timur

Scan QR CODE Test Drive
Pada Aplikasi M-TOYOTA



DOWNLOAD
APLIKASI M-TOYOTA



Urusan Toyota lebih mudah!

AUTO 2000
member of ASTRA





PROMO TRAKTIR TEMAN BUY 4 GET 1 FREE

Start From ^{Rp}15.000 nett/person



Nasi Goreng Kampung



Mie Goreng Kampung



Tempe Goreng Tepung



Pisang Goreng Kaya



Teh Tarik Spirit

BEBAS PILIH MENU !

*syarat dan ketentuan berlaku

www.hotelgrandkartika.com/inspirasi



Peringatan Hari Sumpah Pemuda, Ketua Komisi IV Ajak Generasi Muda Terus Tingkatkan Kemampuan

SAMARINDA - Akhmed Reza Fachlevi, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, mengimbau para pemuda di Bumi Etam untuk siap menghadapi tantangan masa depan. Apalagi setelah Kaltim ditunjuk menjadi lokasi Ibu Kota Negara (IKN).

Menjelang peringatan Hari Sumpah Pemuda, Reza menerangkan sebagai generasi penerus bangsa seyogyanya para pemuda tak apatis dengan aspek dan isu yang berkembang di negara ini. Serta terus meningkatkan kemampuannya, serta memiliki karakter yang kuat agar memiliki daya saing.

"Kalian adalah pemuda masa depan. Kaltim kini sudah menjadi ibu kota negara, artinya kalian punya peran besar dalam sejarah. Ayo, pemuda Kaltim, tunjukkan kehadiran kalian untuk semua," ujar Reza pada Jumat (27/10/2023).

Politisi Gerindra ini, menyebut bahwa pemuda kini harus bisa menanggapi tantangan dunia yaitu menyiapkan generasi yang memiliki skill atau keahlian yang sesuai dengan tuntutan zaman.

"Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas pendidikan adalah dengan meningkatkan pembelajaran bahasa asing. Bahasa adalah jendela dunia. Dengan menguasai bahasa asing, pemuda dapat memperluas wawasan dan jaringan mereka," katanya.

Reza juga mengingatkan pemuda kini harus memiliki wawasan kebangsaan dan semangat mengisi kemerdekaan. Dia berharap pemuda dapat berperan aktif dalam pembangunan dan meneruskan perjuangan para pahlawan.

"Pemuda adalah agen perubahan. Pemuda harus menjadi pelopor dan penggerak dalam segala bidang, serta harus menjaga nilai-nilai luhur bangsa dan menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945," ungkapnya.

Reza berpesan agar pemuda tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif yang dapat merusak masa depan mereka. Ia mengajak pemuda untuk selalu berpikir positif dan kreatif dalam mengembangkan potensi diri dan daerah.

"Saya yakin pemuda Kaltim memiliki semangat juang yang tinggi dan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan bangsa dan negara," imbuhnya.

Selain itu, katanya peran pemuda dalam menghadapi pemilu sangat penting untuk menentukan masa depan Indonesia.

Ia menjelaskan, dalam kepemiluan, pemuda dapat berkontribusi dalam berbagai cara, seperti meningkatkan

partisipasi dalam pemilu dengan melakukan registrasi pemilih dan menggunakan hak suaranya. Kemudian, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghormati perbedaan pendapat dan pilihan politik.

Dirinya juga meminta, para pemuda mengawasi jalannya pemilu dengan menjadi penyelenggara, pengamat, atau relawan. Lalu mengembangkan kreativitas dalam kampanye politik dengan menggunakan media sosial, seni, atau budaya. Dan tak luput, ucapnya, yakni menghindari politik uang dan politik identitas yang dapat merusak demokrasi dan keadilan," tutup Reza.

"Pemuda adalah agen perubahan, partisipan aktif, pemilih yang kritis, dan pengawas yang jujur," ucapnya. (eky/adv/dprdkaltim)

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari



Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi

Andi Faisal Serap Aspirasi Masyarakat Desa Bente Tualan

PASER - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari Komisi I, Andi Faisal Assegaf mengadakan reses di Desa Bente Tualan, Kecamatan Longkali, pada Senin (23/10/2023) lalu. Kegiatan ini merupakan bagian dari reses massa persidangan III Tahun 2023 yang bertujuan untuk mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat.

Andi Faisal Assegaf menjelaskan bahwa reses adalah kewajiban anggota DPRD yang dilakukan tiga kali dalam setahun. Reses berfungsi sebagai sarana untuk mengetahui kebutuhan masyarakat sesuai dengan kondisi sosial dan geografis mereka. Aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat akan diteruskan ke pemerintah untuk ditindaklanjuti.

Selain itu, Andi Faisal Assegaf juga mengharapkan agar masyarakat dapat menyampaikan usulan mereka dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) di



Andi Faisal Assegaf saat Gelar Reses di Desa Bente Tualan.

tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. "Kami akan selalu berjuang untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat dan meminta pemerintah untuk memprioritaskannya. Kami selalu siap untuk melayani aspirasi warga," ujarnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam reses. Ia berjanji akan terus berjuang demi kesejahteraan

aan masyarakat.

Turut hadir dalam reses tersebut Hj. Noverie Amelia Parmiesca, Anggota DPRD Kabupaten Paser, Kaur Pembangunan Desa Bente Tualan, Ketua BPD, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. (Adv/dprdkaltim)

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari

Soal Buaya Riska, Wakil Ketua Komisi IV Sarankan Dirawat Lembaga Konservasi

SAMARINDA - Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati mendukung rencana Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik untuk membuat penangkaran khusus bagi buaya Riska yang berorientasi pada konservasi.

"Buaya Riska adalah aset yang sangat berharga untuk melestarikan spesies yang terancam punah," ujar Puji di Samarinda awal pekan lalu. Dia mengusulkan agar buaya Riska dikelola oleh lembaga konservasi atau organisasi yang peduli dengan perlindungan hewan.

"Hal ini penting untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat sekitar serta keberlangsungan hidup hewan tersebut," katanya.

Puji juga menekankan agar pengelolaannya nanti mempertimbangkan aspek lingkungan, khususnya manajemen limbah yang timbul selama pengelolaan. "Lokasi penangkaran buaya tersebut dekat dengan permukiman warga dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, termasuk potensi pencemaran udara. Oleh karena itu, perlu ada tindakan bijak dan berke-



Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati

lanjutan dalam merencanakan pengelolaan hewan tersebut," ungkapnya.

Dia berharap dukungan dari berbagai pihak akan mendorong pengembangan wisata yang mengintegrasikan aspek konservasi hewan dan pengalaman wisata yang berkualitas. "Hal ini juga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah," imbuhnya.

Sebelumnya, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik berjanji untuk mencari solusi terbaik untuk kelangsungan hidup buaya Riska setelah dievakuasi dari habitat asalnya di Sungai Guntung Bontang ke tempat baru di Penangkaran Buaya Teritip, Balikpapan.

"Buaya Riska ini menarik perhatian banyak orang. Namun, Buaya Riska ini adalah binatang buas. Sebagai binatang buas, dia berhak untuk hidup di habitatnya," ucap Pj Gubernur Akmal Malik saat didampingi Ketua Umum TPPKK Tri Tito Karnavian di Penangkaran Buaya Teritip, Balikpapan Timur, Selasa.

Menurut Akmal, kondisi tempat penampungan Buaya Riska sangat tidak memadai. Kondisi ini ditakutkan membuat Buaya Riska semakin stres. Karena itu, dalam waktu dekat pihaknya akan mengundang BKSDA untuk mencari jalan terbaik untuk Riska dan keselamatan masyarakat. (eky/adv/dprdkaltim)

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari

Seno Aji Dorong Pemprov Kaltim Percepatan Lelang dan Pengadaan Proyek Tahun 2024

SAMARINDA - Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji, mengingatkan Pemerintah agar segera mematangkan perencanaan program pembangunan untuk tahun depan. Dia mengharapkan, semua proyek yang direncanakan bisa dieksekusi dengan lancar dan tepat waktu.

Menurut Seno, salah satu faktor penting dalam pembangunan adalah proses lelang dan pengadaan. Dia menilai, proses ini sering kali berjalan lambat dan menyebabkan keterlambatan pengerjaan proyek.

"Proses lelang dan pengadaan harus dilakukan sejak awal tahun. Jangan sampai mepet di akhir tahun. Ini akan

mengganggu kinerja pihak ketiga yang mengerjakan proyek," kata Seno.

Seno menjelaskan, banyak proyek berskala besar yang membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan. Jika proses lelang dan pengadaan tidak efisien, maka pemenang lelang akan kesulitan untuk menyelesaikan proyek sesuai target.

"Ini akan berdampak pada kualitas pembangunan dan serapan anggaran. Banyak anggaran yang tidak terserap karena proyek tidak selesai. Ini disebut Silpa. Kalau Silpa terus terjadi, pembangunan tidak akan maksimal," ujar Seno.

Untuk mengatasi masalah ini, Seno

meminta Pemprov Kaltim untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap proses lelang dan pengadaan. Dia juga berharap, semua pihak bisa bekerja sama untuk mengantisipasi hal-hal yang bisa menghambat pembangunan.

Seno mengaku optimis bahwa pembangunan di Kaltim akan lebih baik di tahun depan. Dia mengatakan, DPRD Kaltim sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mengawasi dan mendukung program-program Pemprov Kaltim. ([eky/adv/dprdkaltim](#))

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari



Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji

Seno Aji Minta Pemerintah Libatkan Kontraktor Lokal pada Pembangunan IKN

SAMARINDA - Geliat pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) terus berlangsung. Dalam proses pembangunan di Nusantara diharapkan tak luput untuk melibatkan penyedia jasa konstruksi daerah Kaltim.

Hal demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, saat menghadiri seminar nasional bertajuk 'Strategi dan Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan IKN Terkait Peran Serta Pelaku Jasa Konstruksi di Provinsi Kalimantan Timur' di Grand Senyur Hotel Balikpapan, Kamis (26/10/2023).

Menurutnya Pemerintah Pusat, Badan Otorita dan juga Pemprov Kaltim semestinya tak abaikan kontraktor lokal dalam proses pembangunan Nusantara di Kaltim. Karena sejatinya kehadiran IKN, semestinya memberikan dampak positif pada masyarakat Kaltim.

"Maka sangat baik apabila badan Otorita bersama dengan pemerintah Provinsi Kaltim untuk selalu memberikan andil yang positif kepada para pelaku jasa konstruksi lokal," ucap Politisi Gerindra ini.

Seno lebih lanjut mengatakan, sebaiknya para pelaku jasa konstruksi

melakukan Kerjasama Operasi (KSO) dengan perusahaan skala nasional, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Inilah yang kita harapkan dengan adanya seminar nasional ini. Di sini banyak hadir para pelaku jasa konstruksi, para pemilik perusahaan jasa konstruksi yang kemungkinan juga sebagian besar ikut andil dalam pembangunan Kaltim," tutup Seno. ([eky/adv/dprdkaltim](#))

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari

Kenali Ciri, Penyebab, dan Cara Mengatasi Anak Terlambat Bicara

BONTANG - Kemampuan bicara anak merupakan salah satu yang paling dinanti-nanti oleh setiap orang tua. Memasuki usia 2 tahun, kemampuan bicara anak sudah bisa dikatakan cukup lancar, meski yang diucapkan belum jelas dan beraturan.

Namun, jika anak kesulitan berbicara atau sama sekali tidak bisa mengucapkan kata apa pun pada usia 2-3 tahun, ini dapat menandakan keterlambatan bicara.

Dokter Spesialis Anak. Dr. Arlita Eka Putri Vivin Puspitasari, Sp.A, di RSUD Taman Husada Bontang menjelaskan ada banyak sekali penyebabnya anak terlambat bicara. Seperti ada gangguan pendengaran, sehingga anak belum bisa berbicara. Bahkan ada juga anak yang kurang stimulasi, yang tidak diajarkan untuk berbicara, maka si anak belum bisa bicara.

"Ada banyak sekali kendalanya jika anak terlambat buat bicara, seperti gangguan pendengaran, di lingkungannya kurang diajak komunikasi, dan bahkan si anak sering diberi gadget," ucapnya, Selasa (24/10/2023) kemarin.

Pada usia 0-6 bulan, anak sudah dapat berbicara, dari kata yang belum ada maknanya atau belum jelas. Intinya mampu bersuara dan mengeluarkan bunyi seperti tertawa.

Pada usia 8-9 bulan, berubah menjadi Babbling. Dapat mengucapkan kata "Mama" atau "Papa" walaupun belum jelas. Jika anak belum bisa mengucapkan, itu bertanda anak sudah terlambat bicara.

Pada usia 16 bulan, minimal harus sudah bisa memanggil orang tuanya, seperti Mama, Ayah, atau Yah. Dan di usia 18 bulan, anak harus menambah kosa katanya, seperti "mamam" untuk makan, "duh" untuk sesuatu yang membuatnya sakit, bahkan "ndak" untuk tidak mau.

Bahkan, di usianya yang beranjak 2 tahun, anak sudah bisa merangkai dua kata menjadi satu kalimat seperti "mah mam", artinya Mamah makan, atau "ndak mau" artinya tidak mau. Jadi anak umur berapa pun sudah ada target cara bicara.

Cara mengatasi keterlambatan bicara pada anak adalah, melakukan pemeriksaan dan mempertimbangkan kemungkinan penyebab anak jadi terlambat bicara. Mulai dari masalah pendengaran, hingga gangguan perkembangan.

"Jadi, bagi para orang tua jangan langsung mengambil hati, atau tersinggung dengan adanya teguran, atau jika ada orang yang menegur terkait anak, menilai jika anak kita terlambat bicara lebih baik didengarkan masukannya dan konsul ke ahlinya," paparnya.

Nantinya, dokter mungkin akan menyarankan anak untuk menjalankan terapi sebagai cara mengatasi anak terlambat bicara. Peran orang tua sangat besar untuk bantu mengembangkan keterampilan bicara anak sejak usia sangat dini. Sebab, bertambahnya kosakata anak akan berbanding dengan jumlah kata yang anak dengar. (dwi/adv)

Penulis: Dwi S

Editor: Nicha Ratnasari



Pentingnya Penggunaan "Buku Pink" KIA

BONTANG - Buku Kesehatan Ibu dan Anak, atau yang sering disebut dengan Buku KIA (buku pink) merupakan integrasi dari beberapa catatan kesehatan seperti kehamilan, persalinan, nifas, Kartu Menuju Sehat (KMS), untuk mengukur pertumbuhan dan perkembangan bayi balita, dan kartu imunisasi.

Dokter Spesialis Anak, dr Arlita Eka Putri Vivin Puspitasari, Sp.A, di RSUD Taman Husada Bontang mengatakan untuk saat ini buku KIA sudah dengan versi yang terbaru, atau dengan versi 2023. Dalam buku KIA tersebut ada cara menilai perkembangan anak, mulai dari usia 0-72

bulan, atau 6 tahun.

"Sekarang ada versi terbarunya buku pink, versi 2023. Semuanya ada di dalam buku itu. Semua langkah-langkah dan cara tumbuh kembang anak," ucapnya, Selasa (24/10/2023) kemarin.

"Bisa dilihat di buku KIA, umur 0-6 bulan harus bisa berbicara apa, gerakannya harus apa, kapan anak bisa tengkurap, kapan anak bisa berdiri, kapan anak bisa berjalan, kapan bisa berhitung 1 sampai 5, kapan bisa hapal warna, semuanya ada di buku tersebut," lanjutnya.

Dijelaskan, fungsi buku KIA tidak berakhir setelah persalinan saja. Setelah

bayi lahir, tumbuh kembang anak juga bisa dicatat didalam buku KIA saat melakukan pemeriksaan, baik itu pemeriksaan prakelahiran, imunisasi, atau penimbangan berat badan setiap bulannya di dokter atau pun Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

"Jadi silahkan untuk para ibu semuanya, dapatkan buku KIA. Kalau pun tidak dapat, dan masih dengan buku versi yang lama, maka silakan untuk mencari di internet dan ketik Buku KIA 2023, dan klik yang paling atas," tutupnya. (dwi/adv)

Penulis: Dwi S

Editor: Nicha Ratnasari



MERCURE

HOTEL

SAMARINDA

GASTRONOMY PACKAGE

Nikmati penawaran spesial menginap di ibis Samarinda sambil menikmati hidangan lezat di restoran. Hanya dengan tambahan mulai dari Rp 24 ribu, Anda akan mendapatkan fasilitas sarapan dan kredit voucher F&B sebesar Rp 100 ribu di restoran kami.

Dapatkan diskon 5% untuk anggota ALL serta tambahan 10% untuk anggota Accor Plus.

Berlaku hingga 30 Desember 2023

SCAN BARCODE
UNTUK MELIHAT RATE



Informasi selengkapnya hubungi:



@mercure_samarinda



0811 - 551 - 6000

all.accor.com

Sopir Truk Concrete Pump Ditetapkan Tersangka

BALIKPAPAN - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Balikpapan resmi menetapkan sopir truk concrete pump atau penembak semen, berinisial SY (48) sebagai tersangka dalam kecelakaan beruntun di Jalan Soekarno-Hatta, KM 1,5 Kelurahan Muara Rapak, Balikpapan Utara pada Kamis (26/10/2023) kemarin.

Kasat Lantas Polresta Balikpapan, Kopol Ropiyani mengatakan, penetapan sopir truk sebagai tersangka setelah melewati proses BAP, dan polisi juga telah memeriksa surat izin mengemudi (SIM) yang masih berlaku.

"Status sopir sudah kita amankan sebagai tersangka, karena memang mengakui bahwa dia gagal melakukan pengereman. SIM B2 milik sopir masih berlaku, artinya memang gagal pengereman," ujarnya, Jumat (27/10/2023).

Lebih lanjut Ropiyani menjelaskan, bahwa pihaknya masih akan kembali berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan juga Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD). Di mana pihaknya akan memeriksa kernet dan pemilik kendaraan roda 6 tersebut selaku penanggungjawab operasional kendaraan yang dikemudikan SY.

Pemeriksaan itu dilakukan kepolisian guna memastikan kondisi kendaraan dalam perawatan berkala termasuk kelengkapan surat-surat kendaraan.



Kasat Lantas Polresta Balikpapan, Kopol Ropiyani saat melihat sopir truk SY diperiksa penyidik.

"Kernet dan pemilik kendaraan yang akan di BAP hari ini dengan membawa surat-surat kelengkapan kendaraannya baik STNK, BPKB maupun KIR kendaraan," jelasnya. Selain sang sopir, polisi juga telah mengamankan kendaraan truk concrete pump atau penembak semen dengan nopol KT 8370 LQ di Makopolresta Balikpapan.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari

An advertisement for Toyota Motor Oil. It features a blue background with a yellow and black seal that says "GUARANTEE PALING HEMAT GUARANTEE". The text reads "SPESIAL PROMO GANTI OLI MESIN" and "Khusus Taxi Online & Travel". There is an image of a mechanic pouring oil into a car's engine, a red and white taxi, and a smiling mechanic in a white and red uniform. Logos for Toyota, Astra, and Auto 2000 are visible. Contact information is provided at the bottom: "Informasi - Call/WA : Adi S : 0822-5435-0088".



Peringati 33 Tahun Mengabdikan, Akabri 1990 Gelar Bakti Sosial untuk Warga Samarinda

SAMARINDA-Dalam rangka memperingati Hari Pengabdian ke-33 Akabri 90, Kepolisian Resor Kota Samarinda (Polresta Samarinda) menggelar bakti sosial bagi masyarakat kota Samarinda. Kegiatan berupa penyerahan 700 paket sembako kepada masyarakat dan 300 paket perlengkapan sekolah kepada anak-anak.

Kapolresta Samarinda Kombes Pol. Ary Fadli, S.I.K.,M.H.,M.Si mengatakan, acara Bakti Sosial Alumni Akabri 90 di Wilayah Polresta Samarinda ini merupakan salah satu kegiatan sosial yang dilakukan oleh panitia dengan tujuan untuk memberikan bantuan sosial serta Pendidikan guna mendukung masyarakat dan anak-anak yang membutuhkan.

"Kegiatan ini juga sebagai upaya untuk membantu Pemerintah untuk Stabilitas Perekonomian dan Program menuju Indonesia Maju," terang Kapolresta Samarinda di Gedung Buddhist Center, Rabu (25/10/23).

Tidak hanya Pembagian Sembako dan Pemberian perlengkapan sekolah,

Akabri 90 juga merenovasi kediaman salah satu anggota Kepolisian Polresta Samarinda Aiptu I Dewa Ketut Sudiana yang beralamat di Jalan KS Tubun Gg. Jabal noor 2 No.60 Rt.10, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda.

"Sebagai wujud kepedulian, kami

juga melakukan perbaikan atau be-bah rumah kepada Bhabinkamtibmas Kelurahan Sungai Pinang Luar Polsek Samarinda Kota yaitu Bapak Aiptu I Dewa Ketut Sudiana," tutup Kapolresta Samarinda. (rls)

Editor : Nicha Ratnasari





MERCURE

HOTELS

SAMARINDA



KARNAVALL Batik Nusantara

Rayakan warisan budaya Batik bersama
ALL - Accor Live Limitless di Indonesia.

Nikmati sarapan gratis dan dapatkan
harga khusus serta pengalaman berbeda

Pesan & menginap hingga 31 Desember 2023.

Book, stay, enjoy
THAT'S ALL.COM

MEDIA KALTIMTARA

SABTU,
28 OKTOBER
2023

.COM

PASANG IKLAN
HUBUNGI:
0853 8684 3137

TERDEPAN DALAM BERITA



BEJAT! DUA PRIA DI TARAKAN CABULI ANAK USIA EMPAT TAHUN

BACA HALAMAN 2



SALURKAN BANTUAN UNTUK KELUARGA TERDAMPAK MUSIBAH

BACA HALAMAN 12

Bejat! Dua Pria di Tarakan Cabuli Anak Usia Empat Tahun

TARAKAN – Dua orang pria diamankan Satreskrim Polres Tarakan lantaran diduga melakukan pencabulan terhadap anak perempuan berusia 4 tahun. Adapun dua pria itu berinisial RM (31) menggunakan masker hitam dan satu lagi berinisial SK (41) menggunakan masker putih.

Kasat Reskrim Polres Tarakan, AKP Randhya Sakhtika Putra mengungkapkan, kronologis kejadian terjadi pada Minggu (22/10/2023) pukul 17.00 Wita, ibu korban yang menjadi pelapor dijemput oleh RM untuk menuju kediaman SK.

Tujuan ibu korban ke rumah SK adalah untuk meminjam uang. Status ibu korban merupakan janda memiliki satu orang puteri dan ibu korban tidak bekerja. “Jadi ke rumah SK untuk meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Adapun dalam kesempatan tersebut, SK dan MR serta ibu korban dan korban sendiri berada di tempat tersebut mulai dari pukul 17.00 Wita sampai dengan pukul 03.00 WITA,” ucap Kasat Reskrim Polres Tarakan, Kamis (26/10/2023)

Pada saat itu, ibu korban melihat anaknya berada di dalam kamar SK. Kemudian anaknya (korban) mengeluhkan kepada ibunya bahwa ia mengalami rasa sakit di bagian kemaluannya. “Setelah ibunya bertanya kenapa sakit, anaknya menjawab bahwa bagian kemaluannya telah dimasukkan jari dan sisir oleh pelaku SK dan MR sebagai terlapor,” papar AKP Randhya Sakhtika Putra.

Selanjutnya, saat itu juga ibu korban tak terima dan melapor ke Polres Tarakan. Hubungan SK, MR sebagai terlapor dengan ibu korban baru merupakan teman yang baru beberapa bulan saling mengenal.

“Hasil pemeriksaan singkat, anak korban mengakui bahwa mulut-

ya dilakban oleh terlapor dan alat kemaluannya dimasukkan sisir dan jari pelaku. Kami juga lakukan visum, hasilnya terdapat luka memar di kemaluan milik korban,” ungkapny.

Setelah itu pihaknya memerintahkan kepada Unit Opsnal Satreskrim Polres Tarakan untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap kedua pelaku. “Pelaku berhasil diamankan Selasa 24 Oktober pukul 22.00 WITA di jalan Agatis, di kontrakan milik pelaku SK ini,” jelasnya.

Atas perbuatannya, pelaku dipersangkakan kepada pelaku yakni pasal 82 ayat 2 juncto pasal 76 E UU Nomor

17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU dan atau Pasal 6 Huruf CUU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman pidana kurungan penjara paling lama 15 tahun penjara. “BB Diamankan satu celana dalam, satu baju, satu celana korban dan lakban,” pungkasnya. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya
Editor: Andhika



Dua pria pelaku pencabulan.

ADE/MKR



Ketua Komisi II DPRD Berau, Andi Amir Hamsyah saat reses di Kampung Bukit Makmur.

Infrastruktur jadi Prioritas dalam Reses Andi Amir di Kampung Bukit Makmur

TANJUNG REDEB – Menggelar reses masa sidang III di Kampung Bukit Makmur Kecamatan Biatan, Anggota DPRD Berau, Andi Amir Hamsyah menerima berbagai aspirasi dari masyarakat.

Adapun dirinya melaksanakan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pilihan (Dapil) 3 sejak 16 Oktober lalu. Diakuinya perlu waktu untuk merealisasikan semua usulan yang masuk.

Diantaranya, peningkatan maupun pengaspalan jalan pemukiman yang menuju jalan poros provinsi, pengadaan sambungan listrik baru dan penerangan jalan umum (PJU), sambungan air bersih hingga jaringan telekomunikasi.

“Semua itu tentunya menjadi atensi bersama dan sudah saya catat untuk disampaikan pada rapat paripurna. Apalagi ini terkait kebutuhan dasar masyarakat,” ucapnya.

Lanjutnya, terkait peningkatan dan pengaspalan jalan kampung pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan DPUPR Berau. Dan akan diusulkan untuk direalisasikan pada APBD Berau.

Selain itu, sambungan listrik baru juga akan segera dikoordinasikan langsung dengan PLN UP3 Berau agar ada penambahan tiang listrik untuk Kampung Bukit Makmur. Pun soal PJU akan dibicarakan langsung dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Berau agar jalan kampung dapat pen-

erangan segera.

Selanjutnya, ketersediaan air dan telekomunikasi juga menjadi atensinya untuk direalisasikan di Kampung Bukit Makmur. Bila perlu dirinya akan memanggil OPD terkait untuk turun langsung ke lapangan guna melihat secara langsung kondisi yang dirasakan masyarakat di sana.

“Jadi pihak eksekutif juga bisa menganggarkannya langsung,” ujarnya.

Andi Amir berharap, masyarakat bisa bersabar sembari dirinya berjuang mengawal seluruh aspirasi yang ditampungnya. “Semua aspirasi tetap saya kawal hingga tahap pengusulan di rapat anggaran nanti,” tandasnya. (adv/and)

Bantuan Bedah Rumah jadi Aspirasi Masyarakat

TANJUNG REDEB - Beberapa hari lalu, Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ichsan Rapi melaksanakan reses di Jalan Madu Rejo, Kelurahan Karang Ambun.

Dia mengungkapkan, aspirasi yang disampaikan warga setempat sama seperti reses sebelumnya, yakni permohonan bantuan BPJS, bantuan bedah rumah dan permohonan pelatihan tata boga serta menjahit.

"Penyerapan aspirasi juga berjalan lancar dan aspirasi yang tertampung juga ada beberapa saja," ucapnya.

Mengenai usulan BPJS pribadi, Ichsan mengaku akan membantu kepengurusannya. "Jadi warga saya minta mendaftarkan identitasnya," ungkapnya.

Terkait aspirasi bantuan bedah rumah, Ichsan mengatakan program tersebut merupakan program bersama Dinas Perkim Berau. Program itu sudah lama dan hingga sekarang sudah membantu lebih dari dua ratus rumah.

"Jadi khusus warga daerah pilih saya, bila ingin mendapatkan bantuan bedah rumah juga caranya hanya cukup memiliki surat hak kepemilikan tanah atas nama sendiri dan memiliki bangunan rumah yang layak



ADV DPRD BERAU

Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ichsan Rapi saat reses di Kelurahan Karang Ambun.

ak untuk diberi bantuan," jelasnya.

"Nanti pihak Dinas Perkim akan mengelola semua persyaratan dan langsung survei ke lapangan untuk pengecekan lokasi," sambungnya.

Terakhir, dirinya juga menjawab usulan warga terkait bantuan pelatihan bagi warga. Ia menerangkan akan secepatnya berkoordinasi dengan OPD terkait, untuk mengusulkan

diadakannya pelatihan khusus untuk ibu-ibu di Kelurahan Karang Ambun secara gratis.

"Jadi silakan ibu-ibu semua membuat suatu kelompok dan buat permohonan yang ditujukan kepada saya dan tinggal saya teruskan ke pihak terkait. Insya Allah melalui saya usulan terkait pelatihan ini akan mudah terealisasi," pungkasnya. (adv/and)

Cegah Perundungan, Harap Pendidikan Karakter Anak Diperhatikan



Sekretaris Komisi I DPRD Berau, Ratna Kalalambang

TANJUNG REDEB - Masih maraknya kasus bullying atau perundungan yang terjadi mendapat perhatian serius oleh Sekretaris Komisi I DPRD Berau, Ratna Kalalambang. Ia menilai, agar kasus tersebut dapat dicegah, perlu melibatkan semua pihak. "Harus jadi perhatian serius, karena berdampak buruk terhadap korban," ungkapnya.

Dirinya menyebut, tak sedikit korban yang berujung pada kematian akibat perundungan. Bagi pelaku juga bisa berakibat buruk, mulai dari gangguan mental, merusak karakter dan kecerdasan. "Lembaga pendidikan harus menjadi lingkungan yang bebas dari perilaku ini, karena bullying bukan hanya tanggung jawab guru saja melainkan tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh komponen masyarakat," terangnya.

Upaya konkret untuk pencegahan perundungan, sebutnya, adalah pendidikan karakter yang dimulai dari lingkungan rumah. Orang tua harus bisa menjadi teladan bagi anak.

Pun begitu dengan guru di lingkungan sekolah, harus bisa menjadi orang tua kedua yang membimbing anak. Bila tidak, maka perilaku perundungan akan menjadi watak hingga dewasa dan merugikan lingkungan sekitar. "Dengan perbaikan akhlak siswa dan kesadaran kolektif, diharapkan kasus bullying dapat diminimalisir dan akhirnya dihapuskan dari lingkungan pendidikan," tutupnya. (adv/and)

Harap Kakam Terpilih Menyusun Program yang Pro Terhadap Masyarakat

TANJUNGREDEB - Pemilihan Kepala Kampung (Pilkakam) se-Kabupaten Berau, resmi berakhir. Pemilihan serentak di 13 kecamatan tersebut banyak melahirkan wajah baru yang berkecimpung di dunia politik Bumi Batiwakkal.

Hal ini pun tak luput dari pandangan, Ketua DPRD Berau, Madri Pani. Dirinya meminta agar para Kakam terpilih menyuguhkan program kerja yang pro kepada masyarakat.

"Diharapkan, Kakam segera menyesuaikan diri pada sistem pemerintahan kampung. Terlebih pada alur pengambilan kebijakan dan penyusunan program demi kemajuan masyarakat kampung," tuturnya.

Politikus NasDem tersebut juga menekankan, setiap Kakam terpilih memiliki inovasi dan kreatifitas yang baru guna meningkatkan kesejahteraan warganya. "Saya harap mereka punya inovasi baru untuk memajukan kampung masing-masing," jelasnya.

Kakam baru yang terpilih dalam naungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau pun harus bisa mensejahterakan warganya.

"Berbeda kalo Kakam incumbent pasti punya pengalaman di birokrasi dalam menjalankan tugas, sehingga harapan saya punya inovasi yang baik untuk kampungnya maju rakyatnya sejahtera," pungkasnya. (adv/and)



Ketua DPRD Berau, Madri Pani

Minta Pemerintah Patuhi Aturan PBG



Anggota Komisi II DPRD Berau, Nurung

TANJUNG REDEB - Masih banyaknya kontroversi mengenai permasalahan izin Peretujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi sorotan Anggota Komisi II DPRD Berau, Nurung. Apalagi tak sedikit bangunan gedung milik pemerintah daerah yang belum mengantongi izin.

Dirinya mengungkapkan, seharusnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mematuhi aturan PBG yang berlaku saat ini.

"Suatu instansi pemerintahan harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Jangan sampai buat malu, karena pemerintah tidak tertib administrasi," ungkapnya.

Ditegaskannya, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak tertib administrasi. Pasalnya, aturan tersebut dibuat oleh pemerintah. Dengan demikian jika ada kendala, pemerintah seharusnya juga bisa menyelesaikannya.

"Kalau pemerintah kesulitan. Apalagi masyarakat biasa. Tentunya, akan sangat kesulitan," tegasnya.

Untuk diketahui, hingga Oktober 2023, baru terdapat 33 izin pendirian bangunan gedung (PBG) dan 25 sertifikat layak fungsi (SLF) yang diterbitkan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Berau.

Capain itu masih berada di bawah 50 persen dari banyaknya permohonan izin PBG dan SLF yang diajukan. Bahkan, beberapa bangunan gedung yang dibangun pemerintah daerah belum memiliki izin PBG. (adv/and)



Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman

Tingkatkan Sektor Pertanian, Berangkat Petani Studi Banding dalam Tiap Tahun

TANJUNGREDEB – Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman memiliki program rutin setiap tahun berupa studi banding untuk para petani ke luar daerah guna belajar, tiru dan modifikasi konsep pertanian. Dalam rangka meningkatkan wawasan, ilmu pengetahuan seputar pertanian.

Adapun setiap tahun sekitar 15 orang yang diberangkatkan baik pada sektor pertanian, perikanan dan peternakan. Sejauh ini sudah terlaksana sebanyak 4 kali. Bahkan, dirinya berencana akan memberangkatkan penyuluh pertanian juga. Itu berdasarkan usulan reses yang diterimanya di daerah pilihan (Dapil) 4.

“Agar para penyuluh dan petani ini bisa terhubung sehingga apa yang diinginkan untuk kemajuan sektor pertanian dapat tercapai,” katanya.

“Motivasi saya ingin agar petani

kita melek dan melihat kondisi pertanian diluar. Entah study, tiru lalu dimodifikasi atau seperti apa,” sambungnya.

Yang menjadi fokusnya yakni, meningkatkan hasil produksi pertanian. Seperti petani padi di Berau hanya mampu memproduksi sebanyak 3-4 ton per hektare. Tapi, diungkapkan di daerah Jawa mampu menghasilkan hingga 13 ton per hektare. Itulah yang menjadi perhatiannya untuk dapat ditiru para petani di Berau.

“Karena disini baru 3-4 ton produksinya, tapi di Jawa bisa sampai 13 ton dalam satu hektare,” ungkapnya.

Apalagi, diakuinya para petani di Berau merupakan orang transmigrasi yang telah memiliki lahan seluas 2 hektare dari pemerintah. Yang mana

dianggap mampu untuk bertani dan produksinya didorong untuk terus ditingkatkan.

Sakirman juga berkeinginan untuk membuat program pendekatan kepada para petani yang dibungkus dalam rembug di lokasi persawahan atau perkebunan. Harapannya mereka bisa lebih terbuka untuk diskusi.

“Yang penting kita bisa menangkap apa persolannya utama sektor pertanian di Berau ini,” tuturnya.

Dia juga menambahkan, saat ini Kampung Buyung-buyung pengadaan menjadi pilot proyek pengadaan peralatan penunjang pertanian. Yang diharapkan rampung tahun depan. Termasuk pengadaan drone untuk memudahkan pemupukan jika diizinkan. (adv/and)

Dukung Penuh Inovasi Kapal Pengangkut Sampah

TANJUNG REDEB – Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiyah mendukung pengadaan kapal pengangkut sampah yang dilakukan DLHK Berau untuk membersihkan Sungai Segah dan Kelay yang berada di kawasan perkotaan.

Yang mana saat ini sudah beroperasi setiap hari di sekitar tepian Jalan Ahmad Yani hingga tepian Jalan Pulau Derawan dan sekitarnya.

Dikatakan Syarifatul, untuk menjadi kota yang bersih, sehat, dan indah harus bersih dari sampah. Terlebih sampah plastik yang tidak bisa terurai. Jika terus menumpuk dan dibiarkan akan berdampak tidak baik bagi lingkungan.

“Karena itu memang untuk menunjang kebersihan kota perlu kapal pengangkut sampah seperti itu. Apalagi kalau mengambil sampah yang sudah jatuh ke sungai itu susah juga dipungutnya, ya jadi perlu memang diadakan,” paparnya.

Dengan Kabupaten Berau yang dicanangkan sebagai kota wisata tentunya harus identik dengan kebersihan dan keindahan. Maka bu-

daya cinta kebersihan dan imbauan ajaran kebersihan disebutkan perlu diajarkan sejak dini. Sebab jelas tidak serta merta bisa langsung terbentuk.

“Anak-anak perlu diajarkan untuk membuang sampah pada tempatnya dan berperilaku kalau melihat sampah dibuang. Sehingga budaya itu terbawa sampai besar dan akan dilakukan dimana pun dia berada,” ungkapnya.

Ia berharap, dengan berbagai upaya Pemkab Berau untuk menjaga kebersihan dan keindahan kota, Kabupaten Berau dapat kembali meraih penghargaan Adipura. “Berau dulu pernah dapat Adipura jadi harapannya dengan pengadaan kapal pengangkut sampah ini Adipura bisa diraih kembali,” ucapnya.

Meski baru ada satu kapal, diharapkan dapat membawa perubahan dan menjadi bahan evaluasi untuk mengukur seberapa kemampuan dan kapasitas sampah yang bisa diangkat dalam satu waktu. “Kapal ini dicoba dulu, dites berapa kemampuan dan kapasitasnya. Kalau memang setelah dievaluasi masih kurang ya perlu ditambah,” tutupnya. (adv/and)



Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiyah

Sangat Dibutuhkan, Dorong Pemerintah Segera Realisasikan BLK



Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong

TANJUNG REDEB - Balai Latihan Kerja (BLK) sangat dibutuhkan masyarakat, karena dinilai memiliki peran tinggi terhadap pencari kerja non skill.

Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong mengungkapkan, rencana pembangunan BLK tersebut sudah cukup lama, sehingga dirinya mendorong agar segera direalisasikan.

“Kalau terealisasi, tentu sangat bermanfaat untuk para pencari kerja meningkatkan skill mereka,” tuturnya.

Diketahui saat ini, Pemkab Berau hanya mengandalkan BLK milik perusahaan. Sementara jumlah pencari kerja hingga saat ini terus bertambah.

“Jangan cuma andalkan BLK milik perusahaan, apalagi jumlah yang dapat ditampung pada BLK itu terbatas. Semakin hari jumlah pencari kerja semakin bertambah, salah satunya dari fresh graduate yang pasti membutuhkan pelatihan non skill untuk bekal mereka memasuki dunia kerja,” jelasnya.

Rudi mendesak agar pembangunan BLK tersebut masuk dalam skala prioritas pembangunan oleh Pemkab Berau. Jika BLK tersebut berhasil dibangun, ia yakin hal itu akan menjadi salah satu solusi untuk menekan angka pengangguran di Kabupaten Berau.

“Masyarakat kita membutuhkan BLK ini, karena rata-rata lowongan pekerjaan yang ada membutuhkan tenaga kerja yang siap bekerja. Dan melalui BLK ini para calon pekerja bisa dibina dan dilatih agar siap terjun ke lapangan,” pungkasnya. (adv/and)

UMKM Harus Difasilitasi dalam Pagelaran Berau EXPO

TANJUNG REDEB – Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Wendy Lie Jaya menyoroti biaya sewa tinggi yang dibebankan kepada pedagang yang ingin berpartisipasi dalam perhelatan Berau EXPO 2023 pada 1-10 November mendatang.

Diketahui, pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pemkab Berau memungut biaya sewa tinggi kepada UMKM yang ingin mengisi stan di Expo Berau. Berkisar mulai dari Rp 3-5 juta per tenda. Padahal mereka bekerja didukung APBD Berau yang nilainya mencapai Rp 3 miliar. “Tidak boleh itu masyarakat dibebankan biaya sewa lagi. Kan pelaksanaan Expo Berau sudah disupport APBD Berau,” kata Wendy.

Seharusnya, kata dia, pemerintah daerah wajib memfasilitasi UMKM yang ingin berpartisipasi memeriahkan Expo Berau tahun 2023 ini. Jangan hanya menggembor-gemborkan program peningkatan UMKM. Tapi begitu ada event, peran serta pemerintah daerah tidak ada. “Begitu ada event UMKM malah tidak difasilitasi. Peran pemda tidak ada dan tidak dirasakan langsung oleh pelaku UMKM,” ucapnya.

Memang diakuinya, pihak ketiga selalu berorientasi kepada profit atau keuntungan. Makanya sudah seharusnya pemerintah daerah berperan dari awal. “Jangan cuma jargon saja, tapi tidak di pelaksanaan malah membebankan pelaku usaha,” tuturnya.

Menurutnya, dengan biaya APBD yang besar cukup untuk mengakomodir semua tenda. Sehingga, tidak ada yang dibebankan masyarakat. Bahkan hingga merugikan.

“Harusnya dengan anggaran yang besar cukup untuk mengakomodir semua stan. Kalau sudah pakai APBD untuk apa ada lagi berbiaya lagi?,” tanyanya.

“Itu tidak boleh. Terus pertanyaannya, dana yang ditarik pihak ketiga di setor kemana? Sedangkan mereka bekerja disupport APBD. Pertanyakan itu dengan OPD terkait,” imbuhnya. (adv/and)



Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Wendy Lie Jaya

Dorong Pembenahan Sarpras di SDN 001 Kecamatan Segah



Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Suharno

TANJUNG REDEB – Sektor pendidikan merupakan suatu hal yang harus mendapat perhatian maksimal. Maka dari itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Suharno mendorong pemerintah untuk menambah fasilitas belajar di SDN 001 Gunung Sari, Kecamatan Segah.

Dia mengungkapkan, anggaran pendidikan sangat besar, tetapi masih terdapat kekurangan terhadap sarana penunjang. Maka dari itu, harus ada perhatian khusus dari pihak terkait.

“Jangan dulu membahas soal kualitas pendidikan, tapi tolong penuhi sarana dan prasarana penunjangnya. Bagaimana pendidikan kita mau berkualitas kalau sarana penunjangnya saja masih belum maksimal,” ujarnya.

Akibat kurangnya kursi di sekolah tersebut, aktivitas belajar mengajar saat ini belum dapat berjalan maksimal. Lanjutnya, ada tiga ruangan di sekolah tersebut yang telah dibangun sejak 2022 lalu, namun ketersediaan kursi hingga saat ini menjadi kendala untuk difungsikannya ruangan tersebut.

“Keluhan itu belum diakomodir pemerintah. Saya berharap apa yang menjadi keluhan terkait pendidikan ini bisa diprioritaskan,” tegasnya.

Selain itu, Suharno juga meminta instansi terkait memperhatikan sarana prasarana lain yang masih kurang, agar keinginan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Berau bukan hanya sekadar wacana. (adv/and)



Selamat dan Sukses
ATAS PELANTIKAN
MUHAMMAD SAID, S.H., MH

Sebagai Sekda Kabupaten Berau





Angka Kemiskinan di Bulungan Fluktuatif

TANJUNG SELOR – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bulungan, merilis Laporan Tingkat Kemiskinan Bulungan Periode Maret 2023.

Dari data yang didapatkan oleh media ini, diketahui jumlah penduduk miskin tahun ini mencapai 12.190 orang. Kepada wartawan, Kepala BPS Bulungan, Yuda Agus Irianto dalam laporan tersebut menjelaskan, jumlah penduduk miskin sebenarnya mengalami penurunan 390 orang, dibandingkan tahun lalu.

“Secara persentase, tingkat kemiskinan juga turun 0,33 persen,” ujarnya, Jumat (27/10/2023).

Dia melanjutkan, secara garis besar periode Maret 2014 sampai pada bulan yang sama tahun 2023, tingkat kemiskinan di Bumi Tenguyun, angkanya fluktuatif. Baik itu, dari sisi kuantitas maupun persentase.

“Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bulungan Maret 2022 sebesar 12,58 ribu orang (9,32 persen),

berkurang sekitar 900 orang dibandingkan Maret 2021,” ujarnya.

Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2021 dan Maret 2023, kata dia sejalan dengan adanya pemulihan dari pandemi covid-19.

Disamping itu, Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan, yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin.

“Penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rerata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan,” tuturnya.

Bahwa, garis kemiskinan di Bulungan pada periode Maret 2023 sebesar Rp551.925,- per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2022, Garis Kemiskinan Kabupaten Bulungan meningkat sebesar 7,31 persen.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi

lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rerata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran, mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Periode Maret 2022-Maret 2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) Kabupaten Bulungan mengalami penurunan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan Maret 2023 sebesar 0,84, turun dibandingkan Maret 2022 yang sebesar 1,59. Sedangkan Indeks Keparahannya Kemiskinan Maret 2023 sebesar 0,13, menurun dibandingkan Maret 2022 yang sebesar 0,41. **(tin/and)**

Editor: Andhika



Bupati Bulungan, Syarwani saat membuka arahan soal penyesuaian lahan kebun sawit dan kawasan hutan.

Soal Eksisting Perusahaan di Bulungan, Syarwani Harap Sesuai Regulasi

TANJUNG SELOR - Bupati Bulungan, Syarwani, membuka sosialisasi penyelesaian ketidaksesuaian kebun kelapa sawit dan kawasan hutan serta pedoman perijinan usaha perkebunan.

Kegiatan itu, dihadiri oleh perangkat daerah terkait, para camat dan kepala desa di Kabupaten Bulungan. Dalam paparannya, Syarwani mengingatkan, kawasan perkebunan kelapa sawit yang beririsan dengan kawasan hutan tersebar di setiap Kecamatan yang ada.

"Untuk itu perlu dilakukan pemetaan, terkait potensi penyesuaian tiap kecamatan, karena itu tidak mungkin diseragamkan," jelas Syarwani.

Diketahui, saat ini telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, serta sejumlah peraturan perundang-undangan turunannya. Hal itu,

dimaksudkan, untuk mempercepat penyelesaian permasalahan perkebunan kelapa sawit. "Terutama yang berkaitan dengan polemik mengenai izin lokasi Hak Guna Usaha (HGU) dan kawasan hutan," tuturnya.

Adanya penyelesaian tersebut, sekaligus menjadi komitmen pemerintah dalam mendukung kegiatan investasi di dalam daerah tetap berjalan, terutama untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat di sekitar kawasan perkebunan.

"Kehadiran perkebunan di sekitar masyarakat berdampak baik terhadap serapan tenaga kerja, hingga pertukaran uang atau perekonomian. Hal ini perlu dibimbing sehingga berjalan diatas koridor yang berlaku," terangnya.

Ditambahkan, Syarwani pemerintah daerah juga perlu memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebu-

nan Sawit mengingat di Bulungan terdapat sekitar 20 perijinan perkebunan dan secara existing sudah berdiri 7 Pabrik Kelapa Sawit yang sudah menghasilkan CPO (Crude Palm Oil).

"Karena modal dasar kita membangun hari ini tidak mungkin mengantungkan semata dengan kekuatan APBN tanpa kita hadirkan adanya investasi di daerah, karena itu dilakukan bertujuan untuk mempercepat pembangunan di Bulungan," tegasnya.

Di kesempatan itu, orang nomor satu di Bumi Tenguyun ini, apresiasi atas digelarnya kegiatan untuk meningkatkan tata kelola perkebunan, karena itu dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat maupun pemerintah daerah. (tin/and)

Editor: Andhika





Bupati Bulungan didampingi oleh OPD terkait mengunjungi rumah warga di Jalan Mangga, usai tertimpa musibah kebakaran.

Salurkan Bantuan untuk Keluarga Terdampak Musibah

TANJUNG SELOR - Bupati Bulungan, Syarwani meninjau langsung rumah warga di Jalan Mangga 1, RT 30 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Bulungan.

Diwartakan sebelumnya, 2 unit rumah warga ludes terbakar akibat amokan si jago merah. Kejadian itu, terjadi pada Rabu (25/10/2023) dini hari. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah itu, namun kerugian material seperti dua unit rumah hangus hanya sisakan arang.

Kunjungan orang nomor satu di Bulungan ini, sembari menyerahkan bantuan kepada keluarga yang terdampak musibah.

"Kami turut berduka atas musibah ini, kepada keluarga yang terdampak musibah semoga tabah dan

mudah-mudahan bantuan yang kita salurkan dapat sedikit meringankan beban keluarga," ujar Syarwani.

Sejumlah paket bantuan yang disalurkan, terdiri paket sembako, paket perlengkapan sekolah, pakaian layak pakai, perlengkapan makanan, paket kebersihan dan perlengkapan lainnya. Sebagai bentuk perhatian, Syarwani minta kepada RT, ataulurah untuk mendata dokumen kependudukan warga yang terdampak musibah kebakaran.

"Untuk dokumen seperti sertifikat tanah, dan dokumen kependudukan. Jika ada yang di terbakar kita akan menghubungi BPN supaya sertifikat tanahnya diterbitkan ulang," ujarnya.

Prosesnya, tentu usai berita acara kejadian di keluarkan oleh petugas

yang berwenang. Hal itu, akan dijadikan dasar penertiban sertifikat baru. "Termasuk dengan dokumen kependudukan lainnya," ucapnya.

Sementara itu, Kapolresta Bulungan Kombes Pol Agus Nugraha, melalui Kasi Humas, Bripta Hadi Purnomo mengungkapkan, penyelidikan tengah dilakukan oleh aparat kepolisian guna mengetahui penyebab kejadian serta mengumpulkan barang bukti berdasarkan hasil Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). "Soal musibah itu kepolisian tengah menyelidiki. Serta mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti yang ada," tutupnya. (tin/and)

Editor: Andhika



Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif yang digelar Bawaslu Tarakan.

ADE/MKR

Bawaslu Tarakan Gandeng Insan Pers Sukseskan Pemilu 2024

TARAKAN - Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan mengundang insan pers di Tarakan. Sosialisasi tersebut digelar di Ruang Pertemuan Kantor Kecamatan Tarakan Tengah, pada Jumat (27/10/2023) sore, diikuti puluhan jurnalis dari media online maupun cetakse-Kota Tarakan.

Anggota Bawaslu Tarakan Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Muhammad Saifullah mengatakan, sosialisasi ini bertujuan menyukseskan Pemilu 2024. Insan pers menurutnya, memiliki peran penting dalam menyukseskan Pemilu 2024 khususnya dalam menyebarkan informasi ke publik.

Melihat peran penting media di Pemilu 2024, dia berharap seluruh insan pers dapat bekerjasama dengan Bawaslu untuk menyukseskan Pemilu 2024. "Kami berharap peran aktif media untuk mempublikasikan berita damai dan menghindari hal-hal berbau perpecahan," ucapnya saat diwawancarai awak media usai kegiatan sosialisasi.

Dalam kesempatan ini, Saifullah menjelaskan beberapa poin penting khususnya terkait penyampaian pemberitaan di Pemilu 2024. Yang pertama terkait masa kampanye, secara umum berlangsung selama 75 hari yang dimulai dari tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. "Namun khusus untuk dua metode kampanye rapat umum dan iklan kampanye. Untuk iklan di media teknisnya diserahkan ke KPU. Karena ini ditetapkan KPU termasuk ketentuannya," kata dia.

Selain itu, Bawaslu mengingatkan mengenai konten jajak pendapat, dimana hal itu tidak boleh dipublikasikan pada saat masa tenang. "Dan terakhir, perhitungan cepat atau quick count berdasarkan ketentuan dapat dipublikasikan tiga jam paling cepat setelah proses pemungutan suara," ungkapnya.

Dia menyebut saat ini peserta pemilu tidak diperbolehkan melakukan kampanye dan hanya diberi ruang untuk melakukan sosialisasi. Sosialisasi itu, kata dia, dibatasi dan tidak diperbolehkan dilakukan melalui media sosial maupun penyebaran Alat Peraga Kampanye (APK). "Se-

suai Pasal 79 PKPU 15 Tahun 2023 yang dibolehkan saat ini hanya pemasangan bendera dan pertemuan tatap muka," katanya.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tarakan, kata dia, bersama tim gabungan telah melakukan dua kali penertiban baliho yang melanggar aturan yakni pada 9 dan 12 Oktober 2023. Dari dua kali penertiban itu, total sebanyak 860 APK berhasil diturunkan petugas gabungan yang terdiri dari Polisi, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup.

Sementara itu, Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltara, Aswar Halim, yang dalam hal ini turut menjadi narasumber mengatakan, insan pers dalam pemberitaan harus mengedepankan independen. Dijelaskannya, independen artinya tidak boleh dikontrol atau dipengaruhi oleh orang lain. Sehingga, pemberitaan yang dihasilkan harus netral dan berimbang. "Pers itu harus berimbang. Tidak berpihak tidak condong ke kanan atau ke kiri," pungkasnya. (APC)

Reporter: Ade Praselia

Editor: Andhika

